

Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Papua 2015



Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Papua 2015



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2015

ISBN : 978-602-0963-21-1
No. Publikasi : 94520.1603
Katalog BPS : 2302004.94
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm (B5 ISO)
Jumlah Halaman : ix+103 Halaman

Tim Penyusun:

Pengarah : Johanes de Britto Priyono
Penanggung Jawab : Fadjri Amora
Penyusun : Paul Santoso

Naskah:

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh:

CV. Mitra Karya Pura

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pada periode 2005-2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan secara semesteran metodologi yang sama kembali dilaksanakan pada tahun 2015. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Semester I menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2016, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Papua dengan kondisi Agustus 2015. Dalam publikasi ini menyajikan *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning sytem*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut kabupaten/kota dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap publikasi edisi berikutnya.

Jayapura, Agustus 2016

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua,**



Johanes de Britto Priyono, M.Sc
NIP. 19590916 198501 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	vii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	3
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	5
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Pekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, <i>Underemployment</i> dan Ketidakaktifan	17
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	20
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	20
2.2.6. Produktifitas Tenaga Kerja	21
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	21
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan	21
3. Indikator Pasar Tenaga Kerja	22
3.1. Partisipasi di Dunia Kerja (KILM 1)	22
3.2. Indikator Pekerja (KILM 2-KILM 7)	27
3.3. Indikator Pengangguran, <i>Underemployment</i> dan Ketidakaktifan (KILM 8 –KILM 13)	41
3.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas, 2014-2015	23
Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2014 dan 2015	27
Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk, 2014-2015	27
Tabel 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014-2015	30
Tabel 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2014-2015	33
Tabel 5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2014-2015	35
Tabel 6. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014- 2015	36
Tabel 7. Pekerja Menurut Sektor, 2014-2015	39
Tabel 8. Indikator Pengangguran Papua, 2014- 2015	43
Tabel 9. Indikator Pengangguran Usia Muda di Papua, 2014- 2015	46
Tabel 10. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015	47
Tabel 11. Indikator Setengah Penganggur, 2014-2015	49
Tabel 12. Indikator Ketidakaktifan, 2014-2015	50
Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2014-2015	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan	9
Gambar 2. Pola TPAK Agustus 2015	25
Gambar 3. TPAK Kabupaten/Kota Agustus 2015	26
Gambar 4. Pola EPR Agustus 2015	29
Gambar 5. Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2015	29
Gambar 6. Persentase Pekerja menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/ Kota, 2015	32
Gambar 7. Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten 2015	34
Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2015	36
Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Sektor, Agustus 2015	38
Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota Agustus 2015	41
Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2015	44
Gambar 12. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2015	48
Gambar 13. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2015	51

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2014 dan 2015	54
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur	55
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015	56
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2014 dan 2015	57
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015	58
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015	59
Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015	60
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2014 dan 2015	61
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2014 dan 2015	63
Lampiran 10. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2014 dan 2015	64
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2014 dan 2015	65
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2014 dan 2015	68
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015	69
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015	70

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015	71
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015	72
Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2015	73
Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015	74
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015	75
Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	76

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survey Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

PENDAHULUAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan semakin dibutuhkan guna memberikan gambaran mengenai indikator pasar tenaga kerja. Data tersebut dihimpun melalui kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sakernas tahun 2015 dilaksanakan secara semesteran. Angka estimasi Sakernas semester I mampu menggambarkan indikator pada level provinsi. Pada pelaksanaan semester II (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, estimasi sakernas mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. BPS Provinsi Papua menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization* - ILO) yaitu publikasi Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja / KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program regular pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Papua ini merujuk pada KILM yang diterbitkan BPS RI pada tahun 2011.

Adapun data dan indikator ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini merujuk pada hasil Sakernas tahun 2014 dan 2015. Telah dijelaskan bahwa pelaksanaan Sakernas semester 2 (bulan Agustus) dengan penambahan sampel komplemen, mampu memberikan deskripsi hingga level kabupaten/kota. Namun demikian di beberapa kabupaten pada tahun referensi sebelumnya yaitu tahun 2014, berbagai kendala petugas di lapangan telah menyebabkan realisasi dari minimum sampel blok sensus/rumah tangga tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan data tidak tersedia karena sampel tidak mencukupi untuk estimasi level Kabupaten. Adapun kabupaten yang datanya tidak tersedia yaitu: Kabupaten Intan Jaya, Yalimo, Mamberamo Raya, dan Nabire. Sebaliknya, melalui berbagai upaya dan optimalisasi pelaksanaan di daerah maka Indikator ketenagakerjaan.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Untuk memperoleh data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus dan survey seperti: Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan ketenagakerjaan antar periode pencacahan adalah SAKERNAS.

Sakernas pertamakali dilaksanakan pada tahun 1976. Berbagai perubahan metodologi ataupun periode pencacahan telah terjadi. Tahun 1986 sampai 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Sejak tahun 1994 hingga 2001 dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 2004, selain dilaksanakan setiap tahun juga dilaksanakan secara triwulanan. Dan mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 Sakernas berlangsung secara semesteran yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan keakuratan data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas pada tahun 2011 dilakukan secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November yang dirancang untuk estimasi level provinsi. Sedangkan untuk estimasi level kabupaten/kota, pada triwulan 3 (bulan Agustus) ditambah sampel komplemen. Selanjutnya, Mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari (Sakernas Semester I) untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat provinsi. Pada bulan Agustus, selain sampel Sakernas Semester II terdapat sampel tambahan untuk memperoleh estimasi penyajian data hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan pengumpulan data Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dan secara khusus, ingin memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Sepanjang tahun 2011 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumahtangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumahtangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus (BS) baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 BS tersebut terbagi menjadi 5.000 BS triwulan 3 dan 15.000 sisanya adalah blok sensus tambahan. Penambahan ini bertujuan untuk mampu mengestimasi data hingga level kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumahtangga korps diplomatik, rumahtangga yang tinggal di blok sensus khusus, rumahtangga khusus di blok sensus biasa tidak terpilih sebagai sampel. Di provinsi Papua sendiri, Sakernas dilaksanakan pada 204 blok sensus triwulanan untuk level provinsi dan pada pelaksanaan Agustus ditambah 612 blok sensus menjadi 816 blok sensus sampel untuk estimasi level kabupaten/kota. Total rumahtangga sampel untuk pelaksanaan Agustus sebesar 8160 rumahtangga.

Dari setiap rumahtangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumahtangga (ART) meliputi nama, hubungan dengan kepala rumahtangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk ART yang berusia 10 tahun ke atas ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dari berbagai macam variabel yang dikumpulkan oleh Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasikan dan menganalisa data ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya seperti data pengeluaran/konsumsi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan. Perbedaan tujuan ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survey relatif tidak sama.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel Sakernas dan Supas atau Susenas tidak sama. Perbedaan ini mengakibatkan *sampling error* yang dikandung angka estimasi dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar *sampling error*-nya.

3. Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 yang diproyeksi ke bulan Agustus 2015.

4. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan semester II (Agustus) 2006, Sakernas dikerjakan oleh pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai semester I (Februari) 2007 hingga semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim yang terdiri dari 2 pencacah dan 1 koordinator tim. Petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan/KSK) dan pegawai BPS kabupaten/kota. Pengalaman mereka sudah banyak sehingga menguasai medan/lapangan dan memahami dengan baik konsep dan definisi terkait kuesioner Sakernas. Sejak tahun 2011, Sakernas tidak dilakukan secara tim lagi dan

kembali dicacah secara individu. Setiap pengawas meng-handle 2-3 orang pencacah.

5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, Sensus Penduduk, dan Supas berbeda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya. Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan yang selanjutnya menjadi semesteran pada tahun 2015 dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu untuk menyusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di samping itu, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan /KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan para tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari departemen Tenaga kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DALAM KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO adalah mempromosikan pekerjaan yang layak yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Penerapan konsep layak untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan suatu multitafsir. Persepsi setiap orang mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan.

Selain pekerjaan layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Ini diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan melalui identifikasi kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih /*exceeds working hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu (*full employment*), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukan target baru 1b (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*employment to population ratio / EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktifitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun hingga saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktifitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Saat ini semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan secara agregat. Salah satu keuntungan menggunakan data agregat adalah relatif lebih mudahnya melakukan perbandingan antar wilayah. Contohnya tingkat pengangguran, bisa dibandingkan antar daerah. Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah tidak hanya saja mengamati tingkat pengangguran, tetapi harus melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja lainnya. Oleh karena itu, dalam menganalisis pasar tenaga kerja yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Pengelompokan penduduk usia kerja menjadi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja dan bukan angkatan kerja, KILM 13); penduduk yang bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang masuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan underutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggungjawab rumahtangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan atau program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat

dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan “putus asa” / *discourage worker*, yaitu karena merasa tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai dan tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa. Jika data tersebut tersedia dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang mengalami kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam satu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka pekerja dapat lebih mampu meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah “pekerjaan yang layak”. Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran nominatif?

Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pada pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur menjadi sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di kegiatan ekonomi formal, rombongan tenaga kerja akan berlomba-lomba mengisi kesempatan itu.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

PENJELASAN TEKNIS

2

BAB 2

PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

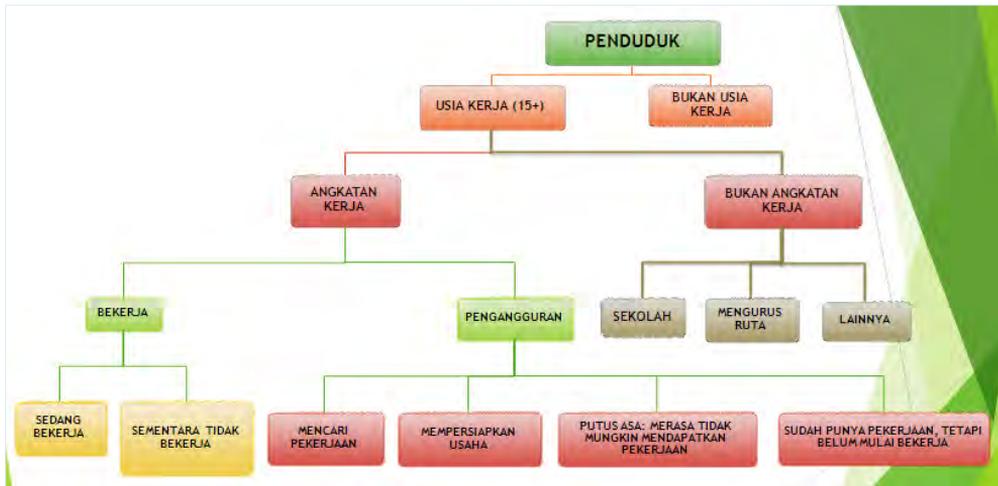
2.1 PENJELASAN UMUM

Sejauh ini sumber data makro mengenai situasi ketenagakerjaan yang secara luas dianggap paling kredibel adalah berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Suatu survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik secara rutin dalam mengintegrasikan data ketenagakerjaan yang mempunyai peran penting, karena dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode survei.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti yang tercantum dalam buku ***“Surveys or Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual Concepts and Methods***, ILO 1992. Tujuannya adalah agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concepts*) yang dapat dilihat pada bagan ketenagakerjaan di bawah ini.

GAMBAR 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN



The *Labor Force Concept*, Yang Disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO). Perlu juga dipahami beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap. Berdasarkan bagan ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia dalam memberikan batasan umur pada penduduk usia kerja, menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari penduduk usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Pemberian batas bawah dan batas atas bervariasi dari setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sebagai contoh penggunaan batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Canada (14 dan 15 tahun), India (5 dan

15 Tahun), dan Venezuela (10 dan 15 tahun), sementara penggunaan batas atas penduduk usia kerja contohnya: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara termasuk Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan **bukan angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai /melakukan aktivitas ekonomi. Diantaranya dirinci menjadi tiga kelompok besar kegiatan, yaitu penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang sedang mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sedang melakukan kegiatan lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Kegiatan bekerja mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi mereka yang sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Mencari kerja di sini adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru yang bertujuan memperoleh

penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/ karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah jika ada 'tindakan nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/ musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari kerja/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, namun pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Periode referensi lainnya yang digunakan dalam Sakernas adalah kriteria satu jam. Kriteria ini digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam

kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2 INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

ILO meluncurkan Indikator Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi formal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidak-aktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok muda),

- KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (underemployment), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
 - 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
 - 6) Produktifitas tenaga kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
 - 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
 - 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Table publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.2.2. INDIKATOR PEKERJA

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara

biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

- Berusaha sendiri.
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- Buruh/Karyawan/Pegawai.
- Pekerja bebas di pertanian.
- Pekerja bebas di nonpertanian.
- Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- Penduduk yang berusaha, terdiri dari:
 - Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;
 - Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks

pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
- Pertambangan dan penggalian;
- Industri pengolahan;
- Listrik, gas dan air;
- Bangunan;
- Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
- Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
- Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
- Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *Agriculture*/Pertanian, *Manufacture*/Manufaktur dan *Services*/Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3)*.

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan

proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/ informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDER-EMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada

standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja

kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi: Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi: Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak; Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan

pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

<http://papua.bps.go.id>

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED-97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/ Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan

Berdasarkan Jabatan Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckmen*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah Per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PEKERJA MISKIN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

INDIKATOR PASAR
TENAGA KERJA

3

BAB 3

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

3.1 PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja sakernas agustus 2014 dan 2015.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2015 yang masuk dalam angkatan kerja ada sebanyak 1.741.945 jiwa, meningkat jika dibandingkan Agustus 2014. Pada periode yang sama, TPAK meningkat dari 78,67 persen pada Agustus 2014 menjadi 79,57 persen pada Agustus 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja disertai kenaikan pada TPAK salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk usia kerja (15 plus) yang penambahannya hampir sebanding dengan penambahan angkatan kerja itu sendiri.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, TPAK laki-laki meningkat dari 85,83 persen pada Agustus 2014 menjadi 87,66 persen pada

Agustus 2015. Sebaliknya TPAK perempuan menurun dari 70,49 persen pada Agustus 2014 menjadi 70,33 persen pada Agustus 2015. TPAK perkotaan juga meningkat dari 62,22 persen pada Agustus 2014 menjadi 63,32 persen pada Agustus 2015 demikian juga dengan TPAK perdesaan yang naik dari 84,61 di Agustus 2014 menjadi 85,91 pada Agustus 2015.

<http://papua.bps.go.id>

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2014 - 2015

Kategori	2014	2015
TOTAL	78,67	79,57
LAKI-LAKI	85,83	87,66
PEREMPUAN	70,49	70,33
PERKOTAAN	62,22	63,32
PERDESAAN	84,61	85,91
(15-64)	79,45	80,28
LAKI-LAKI	86,55	88,32
PEREMPUAN	71,36	71,15
PERKOTAAN	63,18	64,45
PERDESAAN	85,23	86,37
(15-24)	59,64	63,23
LAKI-LAKI	60,87	66,02
PEREMPUAN	58,27	60,10
PERKOTAAN	34,25	38,13
PERDESAAN	68,63	72,80
(25-54)	88,91	88,16
LAKI-LAKI	98,55	98,36
PEREMPUAN	78,04	76,73
PERKOTAAN	76,77	76,19
PERDESAAN	93,11	92,62
(25-34)	88,12	86,92
LAKI-LAKI	97,94	97,54
PEREMPUAN	77,75	75,71
PERKOTAAN	77,16	75,31
PERDESAAN	92,09	91,47
(35-54)	89,47	89,00
LAKI-LAKI	98,96	98,90
PEREMPUAN	78,26	77,47
PERKOTAAN	76,47	76,83
PERDESAAN	93,81	93,40
(55-64)	73,34	76,31
LAKI-LAKI	81,79	86,57
PEREMPUAN	61,00	61,26
PERKOTAAN	60,97	65,03
PERDESAAN	79,64	82,57
65 Tahun ke atas	40,23	46,19
LAKI-LAKI	52,73	59,43
PEREMPUAN	23,67	28,34
PERKOTAAN	32,51	28,72
PERDESAAN	45,78	58,96

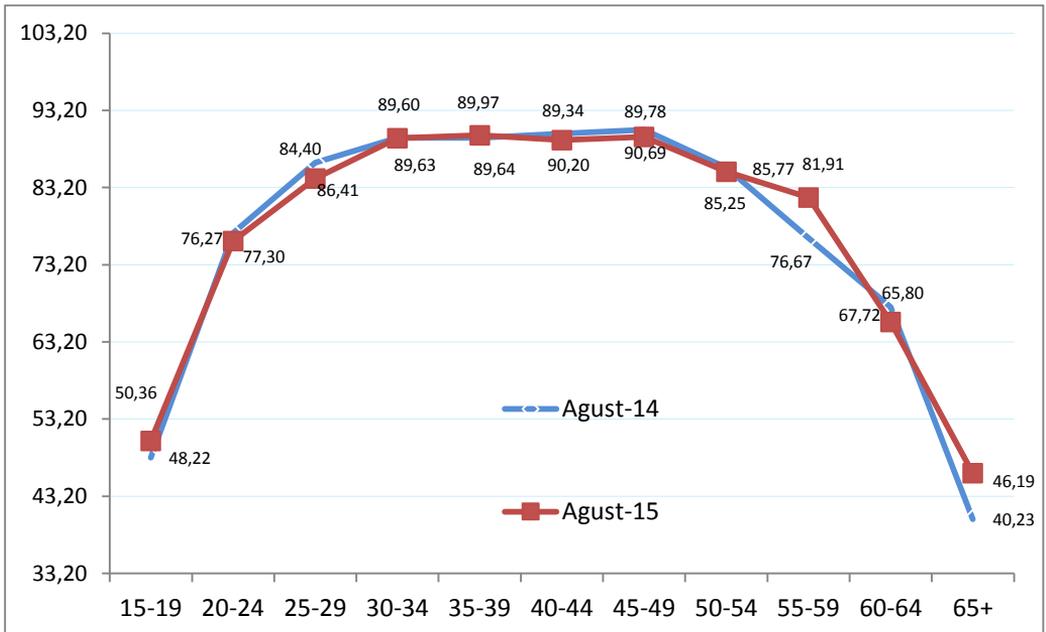
Sumber: Sakernas 2016

Ketika penduduk dipisahkan menurut kelompok umur seperti tabel 1, tampak bahwa secara umum pada kelompok umur usia produktif (15-64 tahun), TPAK meningkat dari 79,45 persen menjadi 80,28 persen. Namun bila dipisahkan menurut kelompok umur tertentu maka terlihat penurunan TPAK pada kelompok umur tertentu diantaranya yaitu kelompok umur 25-54, 25-34, dan 35-54 tahun. Sebaliknya pada kelompok umur penduduk tua (65 tahun ke atas) yang mengalami kenaikan partisipasi angkatan kerjanya yaitu dari 40,23 persen menjadi 46.19 persen atau meningkat sekitar 6 persen di Agustus 2015.

Pada grafik TPAK menurut kelompok umur di bawah ini, yang menggambarkan pola TPAK menurut kelompok umurnya, dapat dilihat bahwa pola yang serupa masih terjadi baik di Agustus 2014 maupun Agustus 2015. Secara umum pada periode yang sama partisipasi angkatan kerja mencapai puncaknya pada kelompok umur 30-34 hingga 45-49 tahun. Pada kelompok umur tersebut partisipasi dan produktivitas kerja sangat tinggi. Selanjutnya tingkat partisipasi kembali berkurang pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

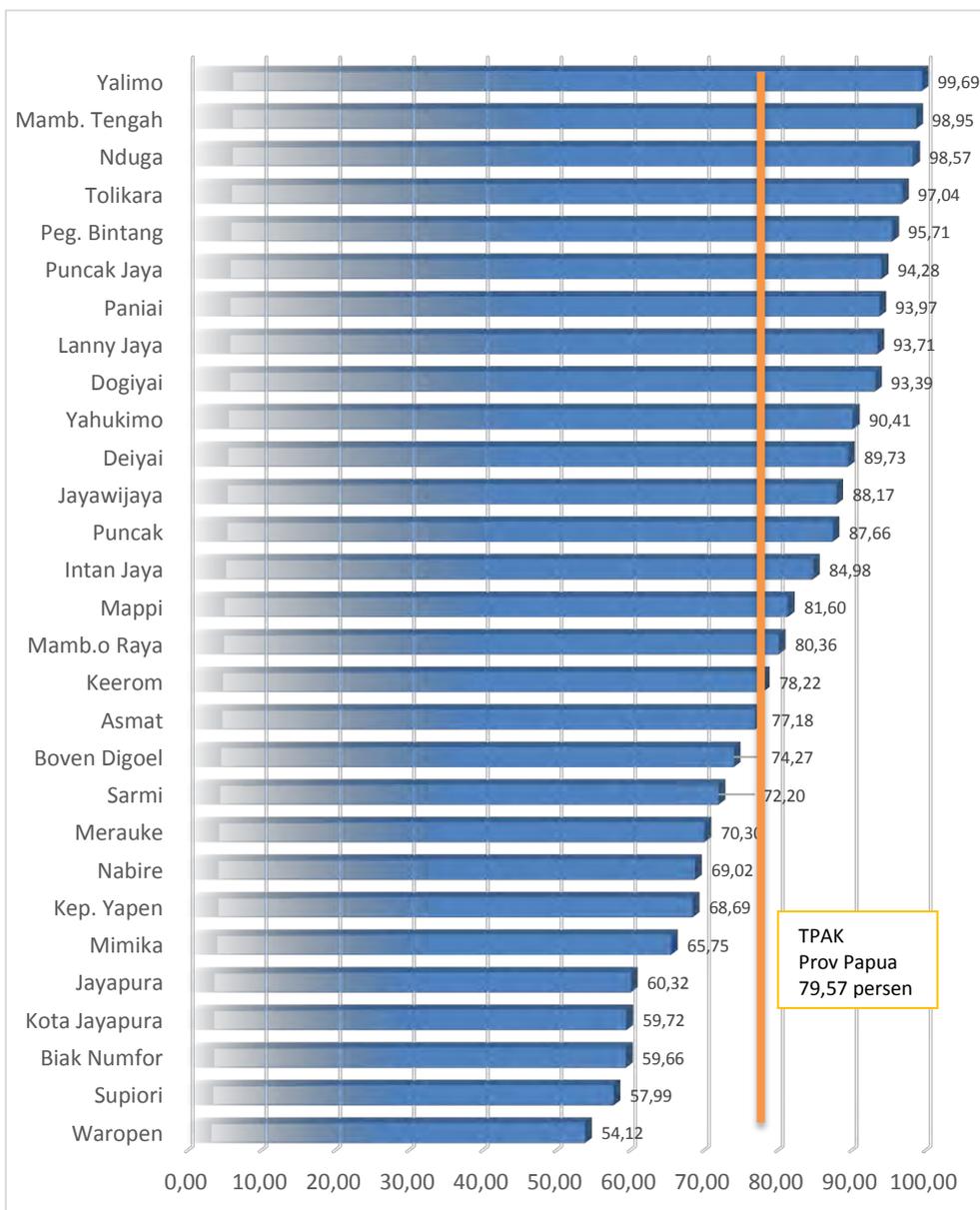
Dengan mengamati grafik kelompok umur tersebut, terlihat bahwa TPAK tahun 2014 terhadap TPAK 2015 cukup fluktuatif yaitu meningkat di kelompok umur awal (15-19 tahun) lalu menurun kembali. Selanjutnya pada kelompok umur 30-34 hingga 50-54 tahun terjadi selisih variasi yang tidak begitu signifikan atau dengan kata lain terlihat adanya pola yang hamper sama. Peningkatan TPAK pada agustus 2014 terhadap agustus 2015 dengan sangat cepat terjadi pada kelompok umur 55-59 tahun dan 65 tahun ke atas

Gambar 2. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2014-2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Gambar 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat pergerakan TPAK yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Agustus 2015 (garis horizontal), sebuah garis vertikal adalah TPAK provinsi Papua. Untuk lebih memudahkan pengamatan, tingkat partisipasi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tampak bahwa setelah diurutkan maka TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Yalimo dan

terendah yaitu Kabupaten Waropen. Disparitas yang terjadi antara TPAK tertinggi terhadap terendah sekitar 45,58 persen. Selanjutnya dengan mengacu pada TPAK Provinsi Papua sebagai rata-rata maka terdapat kurang dari separuh (13 kabupaten) yang TPAK-nya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Papua. Sebaliknya terdapat 16 kabupaten/kota yang partisipasi angkatan kerjanya di atas rata-rata provinsi.

<http://papua.bps.go.id>

3.2. INDIKATOR PEKERJA

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

Pada periode Agustus 2014 ke Agustus 2015, nilai EPR Provinsi Papua meningkat dari 75,96 menjadi 76,40 pada tahun 2014 atau meningkat 0,57 persen. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadi kenaikan persentase penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2014 hingga Agustus 2015. EPR Papua sebesar 76,40 persen pada tahun 2015 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun

ke atas, terdapat sekitar 76 orang yang bekerja pada Agustus 2015. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pada Penduduk Usia Kerja (Penduduk 15 Tahun Ke atas) terjadi peningkatan EPR pada laki-laki dan sebaliknya penurunan EPR pada perempuan. Sedangkan jika dipisahkan menurut tempat tinggal, terjadi penurunan EPR di perkotaan dan peningkatan EPR di perdesaan. Kondisi ini tentu cukup wajar mengingat umumnya aktivitas penduduk di perdesaan adalah di sektor pertanian dengan serapan angkatan kerja yang cukup tinggi.

<http://papua.bps.go.id>

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2014 dan 2015

Kelompok Umur	AGUSTUS 2014	AGUSTUS 2015
Usia 15 tahun ke atas	2 129 404	2 189 230
Laki-laki	1 135 567	1 166 792
Perempuan	993 837	1 022 438
Perkotaan	565 347	614 640
Perdesaan	1 564 057	1 574 590
Umur muda (15-24)	616 745	620 676
Laki-laki	325 333	328 505
Perempuan	291 412	292 171
Perkotaan	161 286	171 244
Perdesaan	455 459	449 432
Umur dewasa (25+)	1 512 659	1 568 554
Laki-laki	810 234	838 287
Perempuan	702 425	730 267
Perkotaan	404 061	443 396
Perdesaan	1 108 598	1 125 158
Umur 15 tahun ke atas yang bekerja	1 617 437	1 672 480
Laki-laki	939 894	979 512
Perempuan	677 543	692 968
Perkotaan	323 912	347 594
Perdesaan	1 293 525	1 324 886
Umur muda(15-24) yang bekerja	332 329	349 007
Laki-laki	175 743	189 477
Perempuan	156 586	159 530
Perkotaan	40 945	41 175
Perdesaan	291 384	307 832
Umur dewasa (25+) yang bekerja	1 285 108	1 323 473
Laki-laki	764 151	790 035
Perempuan	520 957	533 438
Perkotaan	282 967	306 419
Perdesaan	1 002 141	1 017 054

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

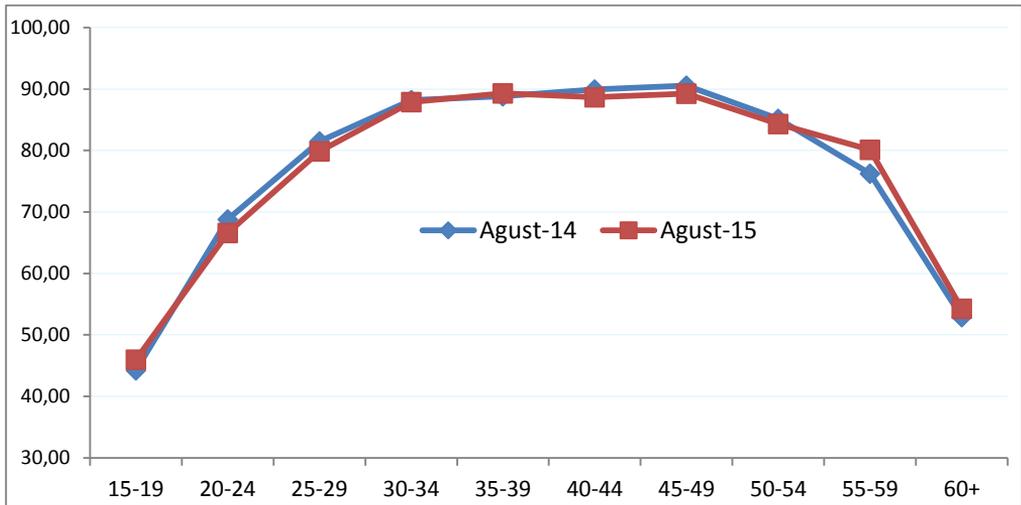
Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2014-2015

Kelompok Umur	AGUSTUS 2014	AGUSTUS 2015
EPR Penduduk 15+	75,96	76.40
Laki-laki	82,77	83.95
Perempuan	68,17	67.78
Perkotaan	57,29	56.55
Perdesaan	82,70	84.14
EPR Penduduk Usia 15-24	53,88	56.23
Laki-laki	54,02	57.68
Perempuan	53,73	54.60
Perkotaan	25,39	24.04
Perdesaan	63,98	68.49
EPR Penduduk Usia 25 Tahun+	84,96	84.38
Laki-laki	94,31	94.24
Perempuan	74,17	73.05
Perkotaan	70,03	69.11
Perdesaan	90,40	90.39

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

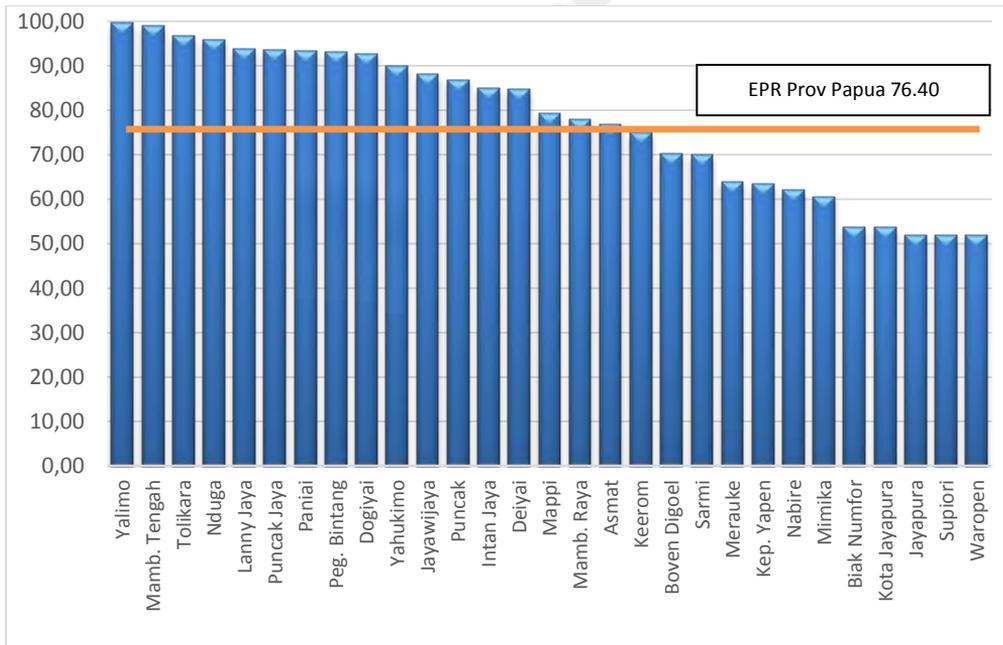
Adapun jika nilai EPR ini diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan di tabel 2, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2015 EPR Penduduk Dewasa (25 tahun ke atas) sebesar 84,38 persen jauh lebih besar dibandingkan EPR Penduduk Usia Muda (15-24 tahun) yang hanya sebesar 56,23 persen. Selisih yang cukup jauh antara EPR 25 tahun ke atas dan EPR 15-24 tahun menunjukkan sebagian besar penduduk usia muda tidak terlibat dalam pasar kerja melainkan masuk dalam bukan angkatan kerja karena aktifitas seperti menempuh ilmu atau sekolah.

Gambar 4. Pola EPR menurut Kelompok Umur, 2014-2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Gambar 5. Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Jika diamati menurut kabupaten/kota, terlihat pada gambar 5 bahwa pada Agustus 2015 4 kabupaten dengan EPR di atas 95 persen yaitu EPR tertinggi yaitu Kabupaten Yalimo (99,64 persen), Mamberamo Tengah (98,95 persen), Tolikaran

(96,57 persen), dan Nduga (95,91 persen). Di sisi lain tampak bahwa terdapat sebelas kabupaten dengan EPR di bawah EPR Provinsi Papua. Empat kabupaten/kota dengan EPR terendah yakni Waropen, Supiori Jayapura dan Kota Jayapura. Rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja adalah karena persentase penduduk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/ karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014-2015

INDIKATOR	2014		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%
	1 617 437	100,00	1 672 480	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	266 919	16,50	293 745	17,56
Berusaha	717 366	44,35	757 587	45,30
Pengusaha	13 303	0,82	15 884	0,95
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	678 138	41,93	717 614	42,91
Pekerja bebas	25 925	1,60	24 089	1,44
Pekerja keluarga	633 152	39,15	621 148	37,14
Pekerja rentan	1 337 215	82,67	1 362 851	81,49
Laki-laki	939 894	100	979 512	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	200 806	21,36	223 515	22,82
Berusaha	598 523	63,68	612 815	62,56
Pengusaha	10 664	1,13	12 630	1,29
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	565 345	60,15	581 187	59,33
Pekerja bebas	22 514	2,40	18 998	1,94
Pekerja keluarga	140 565	14,96	143 182	14,62
Pekerja rentan	728 424	77,50	743 367	75,89
Perempuan	677 543	100,00	692 968	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	66 113	9,76	70 230	10,13
Berusaha	118 843	17,54	144 772	20,89
Pengusaha	2 639	0,39	3 254	0,47
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	112 793	16,65	136 427	19,69
Pekerja bebas	3 411	0,50	5 091	0,73
Pekerja keluarga	492 587	72,70	477 966	68,97
Pekerja rentan	608 791	89,85	619 484	89,40

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pekerja dengan upah dan gaji
- 2) Pekerja yang berusaha /wiraswasta
- 3) Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja

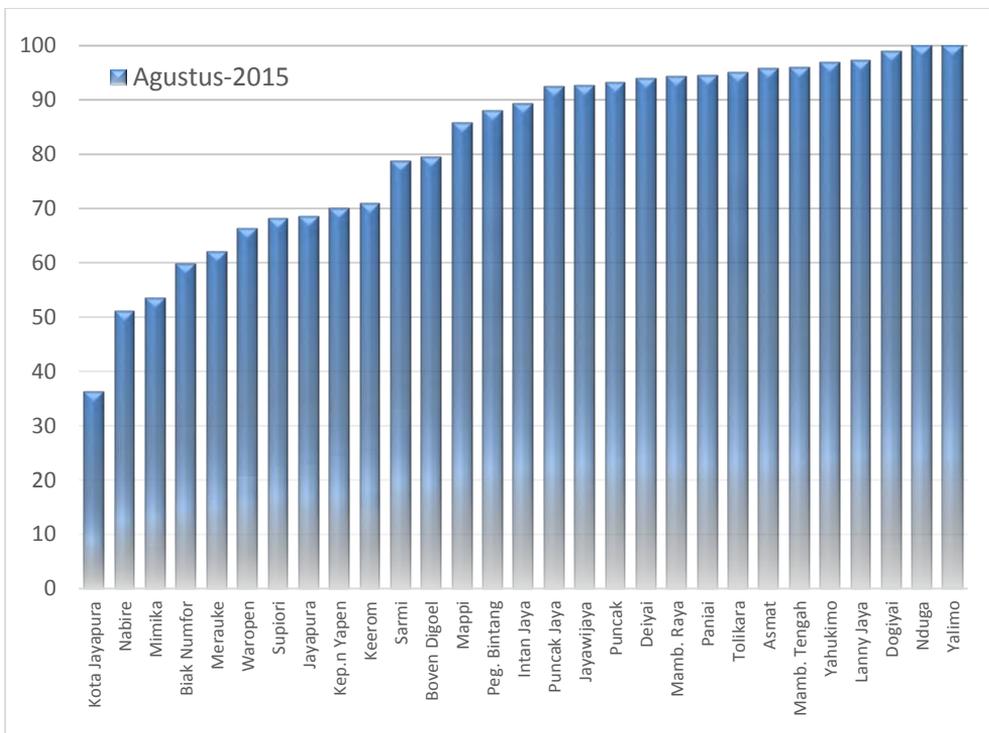
Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama pada tabel di atas menunjukkan pada periode Agustus 2014 dan Agustus 2015 terjadi kenaikan persentase pada pekerja dengan status yaitu: Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai), Pengusaha, Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Sebaliknya terjadi penurunan pada pekerja bebas, pekerja keluarga dan pekerja rentan.

Dilihat dari sisi gender, dianggap masih terjadi ketimpangan secara ekonomi. Tercatat bahwa dominasi pekerja perempuan ada pada status pekerja keluarga masih tinggi. Tampak bahwa persentasenya lebih dari empat kali lipat pekerja laki-laki pada status yang sama yaitu pekerja keluarga. Tidak bisa dipungkiri jika dominasi pekerja rentan adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan. Pada semua status pekerjaan utama, pekerja perempuan memiliki persentase yang lebih rendah dari pekerja laki-laki kecuali status sebagai pekerja keluarga yang membantu keluarganya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, pekerja keluarga yang dimaksud ialah mereka yang membantu keluarga atau suami dalam mencari nafkah tanpa diberi upah. Contohnya istri membantu suaminya berkebun, beternak, jaga kios, dll.

Persentase pekerja rentan menurut kabupaten/kota dapat diamati pada gambar di bawah ini. Dengan mengurutkan persentase pekerja rentan dari terendah hingga yang tertinggi, dapat lebih mudah untuk dianalisa. Dari grafik yang tersaji, terlihat bahwa persentase pekerja rentan di sebagian besar kabupaten masih sangat tinggi. Persentase pekerja rentan yang di bawah 40 persen hanya Kota Jayapura. Sedangkan kabupaten lainnya didominasi pekerja

rentan yaitu di atas 50 persen. Tingginya pekerja rentan di hampir semua kabupaten mengindikasikan masih rendahnya produktivitas, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini ditengarai karena sebagian besar pekerja berpendidikan SD ke bawah, terserap di sektor pertanian dan dengan status bekerja sendiri, dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Gambar 6. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor

Informasi sektoral dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja cenderung berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peralihan aktivitas ekonomi dari yang bersifat tradisional ke aktivitas ekonomi modern.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *Agriculture*/Pertanian, *Manufacture*/Manufaktur dan *Services*/Jasa-Jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification* (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3)

<http://papua.bps.go.id>

Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015

INDIKATOR	2014		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Total	1 617 437	100,00	1 672 480	100,00
Pertanian	1 141 671	70,59	1 236 537	73,93
Manufaktur	74 291	4,59	76 822	4,59
Pertambangan	20 160	1,25	14 623	0,87
Industri	16 048	0,99	16 182	0,97
Listrik, air, dan gas	1 961	0,12	2 926	0,17
Bangunan	36 122	2,23	43 091	2,58
JASA-JASA	401 475	24,82	359 121	21,47
Perdagangan	116 847	7,22	125 585	7,51
Transportasi	50 385	3,12	45 205	2,70
Keuangan	16 447	1,02	17 813	1,07
Jasa kemasyarakatan	217 796	13,47	170 518	10,20
LAKI-LAKI	939 894	100,00	979 512	100,00
Pertanian	628 760	66,90	673 563	68,77
Manufaktur	67 334	7,16	67 222	6,86
Pertambangan	18 900	2,01	13 898	1,42
Industri	11 296	1,20	10 184	1,04
Listrik, air, dan gas	1 828	0,19	2 205	0,23
Bangunan	35 310	3,76	40 935	4,18
JASA-JASA	243 800	25,94	238 727	24,37
Perdagangan	57 245	6,09	64 265	6,56
Transportasi	48 545	5,16	43 113	4,40
Keuangan	10 697	1,14	13 519	1,38
Jasa kemasyarakatan	127 313	13,55	117 830	12,03
PEREMPUAN	677 543	100,00	692 968	100,00
Pertanian	512 911	75,70	562 974	81,24
Manufaktur	6 957	1,03	9 600	1,39
Pertambangan	1 260	0,19	725	0,10
Industri	4 752	0,70	5 998	0,87
Listrik, air, dan gas	133	0,02	721	0,10
Bangunan	812	0,12	2 156	0,31
JASA-JASA	157 675	23,27	120 394	17,37
Perdagangan	59 602	8,80	61 320	8,85
Transportasi	1 840	0,27	2 092	0,30
Keuangan	5 750	0,85	4 294	0,62
Jasa kemasyarakatan	90 483	13,35	52 688	7,60

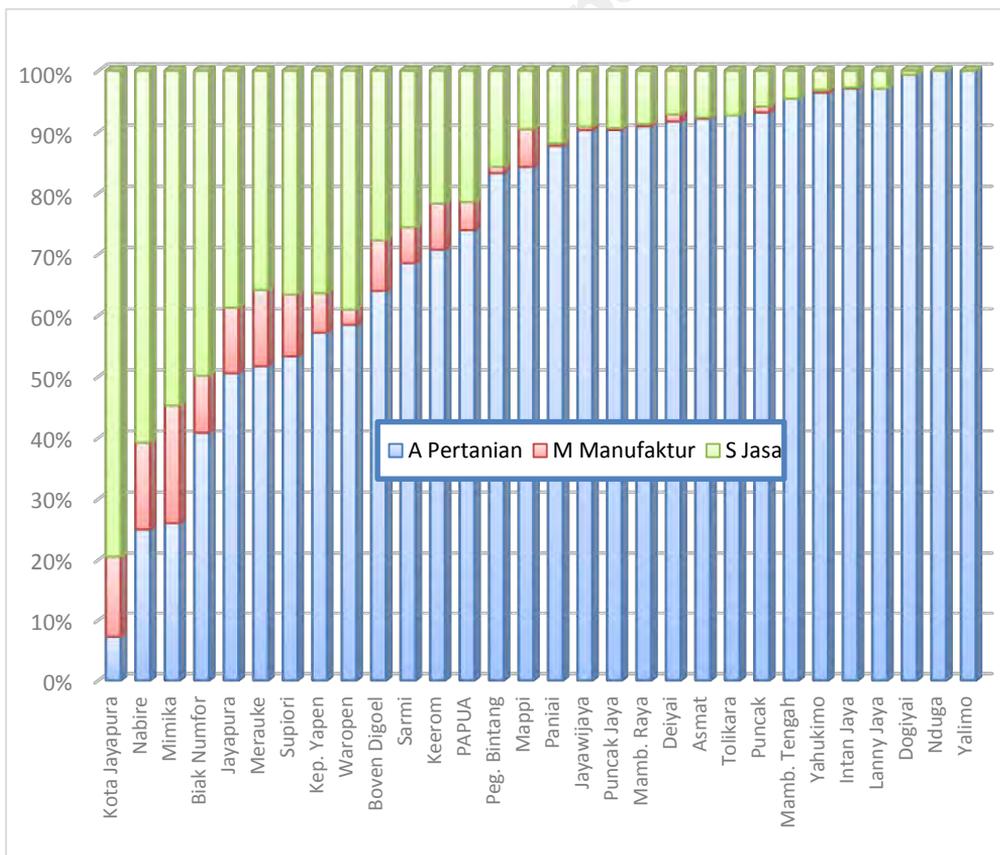
Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa distribusi ketenagakerjaan di Provinsi Papua, masih mendominasi sektor pertanian. Terbukti

secara sektoral proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mencapai 73,93 persen disusul sektor jasa sebesar 21,47 persen. Persentase penduduk bekerja sektor pertanian ini meningkat jika dibandingkan Agustus 2014 yang berada pada kisaran 70,59 persen. Sektor berikut yang persentasenya sama pada periode tersebut adalah sektor manufaktur yaitu 4,59 persen. Sektor jasa menurun pada periode yang sama. Tercatat bahwa dari 24,82 persen pada tahun 2014 menjadi 21,47 persen pada tahun 2015.

Jika melihat sebarannya di kabupaten/kota pada gambar di bawah ini, hal serupa dapat terlihat bahwa hampir di semua kabupaten/kota didominasi Sektor Pertanian dan Sektor Jasa dan pola ini pada dasarnya terjadi baik Agustus 2014 maupun pada Agustus tahun 2015.

Gambar 7. Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2015



KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2014-2015

INDIKATOR	2014	2015
Jumlah Penduduk yang Bekerja	1 617 437	1,672 480
Laki-laki	939 894	979 512
Perempuan	677 543	692,968
Perkotaan	323 912	347 594
Perdesaan	1 293 525	1,324 886
Jumlah Pekerja Paruh Waktu	691 723	556 791
Laki-laki	352 341	269 377
Perempuan	339 382	287 414
Perkotaan	42 106	48 396
Perdesaan	649 617	508 395
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	42,77	33,29
Laki-laki	37,49	27,50
Perempuan	50,09	41,48
Perkotaan	13,00	13,92
Perdesaan	50,22	38,37
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	49,06	51,62

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

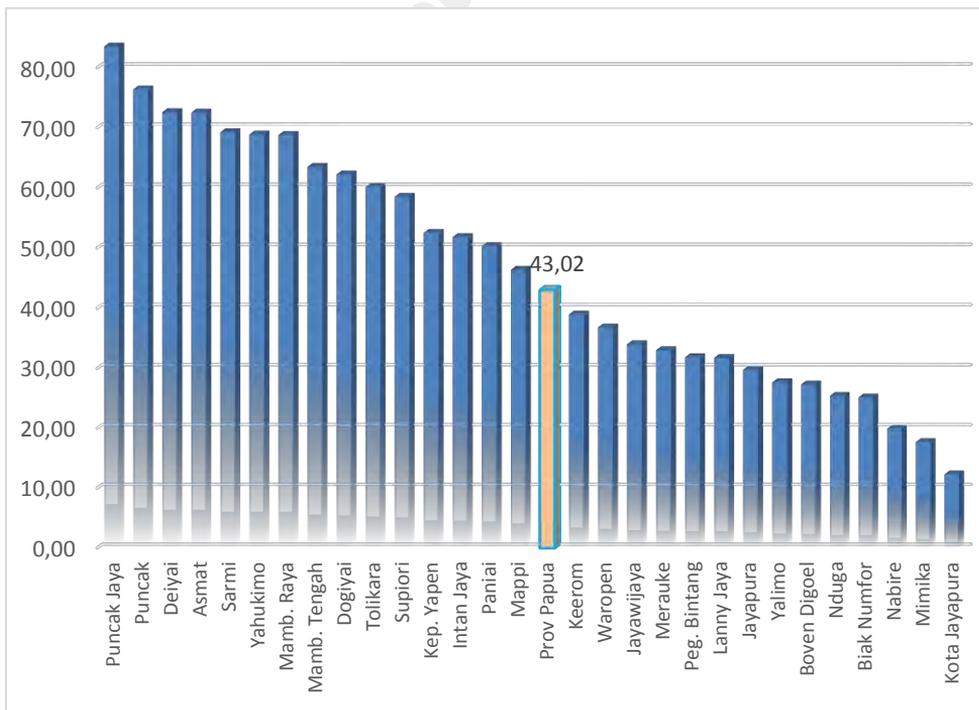
Pada Agustus 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 42,77 persen berkurang menjadi 33,29 persen pada Agustus 2015. Arti dari angka 33,29 persen ini yaitu pada Agustus 2015 dari 100 orang yang bekerja, sekitar 33 orang diantaranya merupakan pekerja paruh waktu atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima

pekerjaan lain. Sementara *share* perempuan pada seluruh pekerja paruh waktu meningkat dari 49,06 persen pada Agustus 2014 menjadi 51,62 persen pada Agustus 2015. Artinya adalah pada Agustus 2015, dari 100 orang pekerja paruh waktu, sekitar 51 diantaranya adalah perempuan.

Berdasarkan klasifikasi tempat tinggalnya, terlihat bahwa pada Agustus 2015 tingkat pekerja paruh waktu perdesaan mencapai sekitar tiga kali lipat di perkotaan. Besarannya masing-masing yaitu 13,92 persen di perkotaan dan 51,62 persen di perdesaan.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota, pada tahun 2015 tingkat pekerja paruh waktu tertinggi berada di Kabupaten Puncak Jaya yaitu sebesar 83,53 persen dan terendah berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika yaitu sebesar 12,30 dan 17,70 persen. Dengan semakin rendahnya persentase pekerja paruh waktu di suatu kabupaten/kota, maka dapat diketahui bahwa pola kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas penduduk bekerja semakin lebih baik.

Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

KILM 6. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam kerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40-48 jam, antara 49-59 jam, 60 jam ke atas.

Hasil Sakernas Agustus 2015 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja bekerja di atas jam kerja normal (35 jam kerja perminggu) yaitu mencapai 55,16 persen. Dan yang bekerja di bawah jam kerja normal sekitar 44,84 persen. Keadaan ini menurun dibandingkan Agustus 2014 yang mencapai 56,75 persen pada pekerja bekerja di atas 35 jam per minggu.

Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2015

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
a. 0 jam	9.299	3.807	13.106
b. 1-14 jam	21.890	34.455	56.345
c. 15-24 jam	116.084	111.993	228.077
d. 25-34 jam	246.486	205.963	452.449
e. 35-39 jam	200.477	161.933	362.410
f. 40-48 jam	252.169	141.751	393.920
g. 49-59 jam	67.972	15.953	83.925
h. 60 jam ke atas	65.135	17.113	82.248

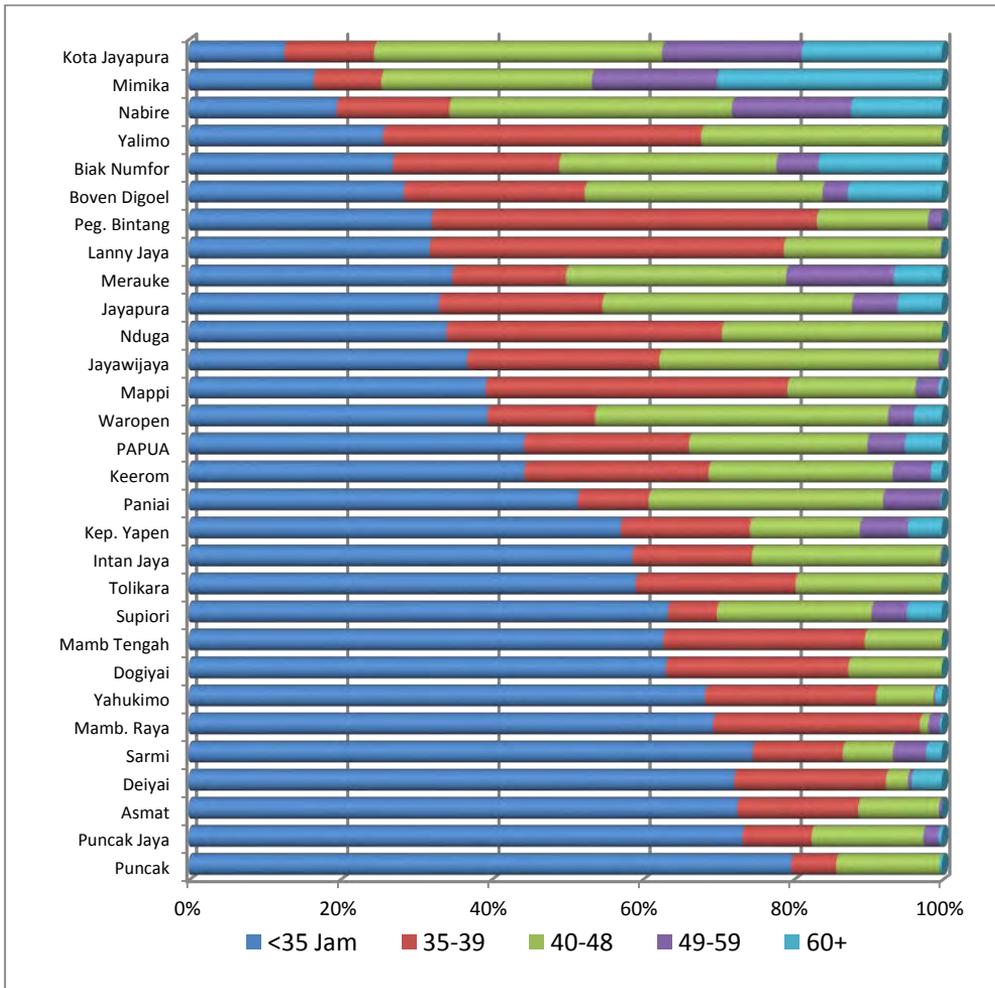
Indikator	Perkotaan	Perdesaan	Total
a. 0 jam	4.843	8.263	13.106
b. 1-14 jam	5.559	50.786	56.345
c. 15-24 jam	20.549	207.528	228.077
d. 25-34 jam	34.044	418.405	452.449
e. 35-39 jam	51.121	311.289	362.410
f. 40-48 jam	128.931	264.989	393.920
g. 49-59 jam	47724	36201	83925
h. 60 jam ke atas	54823	27425	82248

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase pekerja laki-laki yang bekerja di atas 35 jam perminggu jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Sementara itu distribusi penduduk bekerja menurut klasifikasi tempat tinggalnya

di mana pada daerah perkotaan, kelompok yang bekerja 35-39 jam dan 60 jam ke atas lebih banyak dibanding pekerja di perdesaan. Khusus untuk penduduk bekerja 60 jam ke atas yang mencapai 54.823 menunjukkan bahwa produktivitas penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Selanjutnya mengamati distribusi penduduk bekerja pada level kabupaten/kota. Dapat diketahui bahwa penduduk bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu di atas 70 persen pada periode referensi (seminggu yang lalu) antara lain: Sarmi, Deiyai, Asmat, Puncak Jaya, dan Puncak.

Sedangkan sebaliknya tiga kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Kabupaten Nabire, Mimika, dan Kota Jayapura.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal. BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

Pada tabel 8 berikut dapat dilihat sebaran pekerja di sektor formal dan informal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maupun wilayah tempat tinggal. Terlihat bahwa pada Agustus 2015, proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 82,67 persen dan yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 18,51 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, sektor formal mengalami peningkatan yaitu dari 17,33 persen. Sebaliknya sektor informal menurun dari 82,67 persen pada Agustus 2014 menjadi 81,49 persen pada Agustus 2015. Perubahan distribusi penduduk bekerja menurut sektor tersebut dapat

mengidentifikasi kenyataan bahwa telah terjadi peralihan pekerjaan (*shifting*) penduduk bekerja. Hal ini dapat terjadi oleh karena dengan cepatnya ketersediaan penduduk yang siap bekerja (produktif) tidak dibarengi dengan kesiapan dan daya tampung lapangan kerja sektor formal.

Pada periode yang sama, jumlah dan persentase laki-laki maupun perempuan yang bekerja di sektor informal nyaris tidak mengalami perubahan. Selanjutnya jika mengamati penduduk yang bekerja menurut tempat tinggal, maka pekerja sektor informal di daerah perkotaan meningkat, sebaliknya pekerja informal di pedesaan menurun.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2014-2015

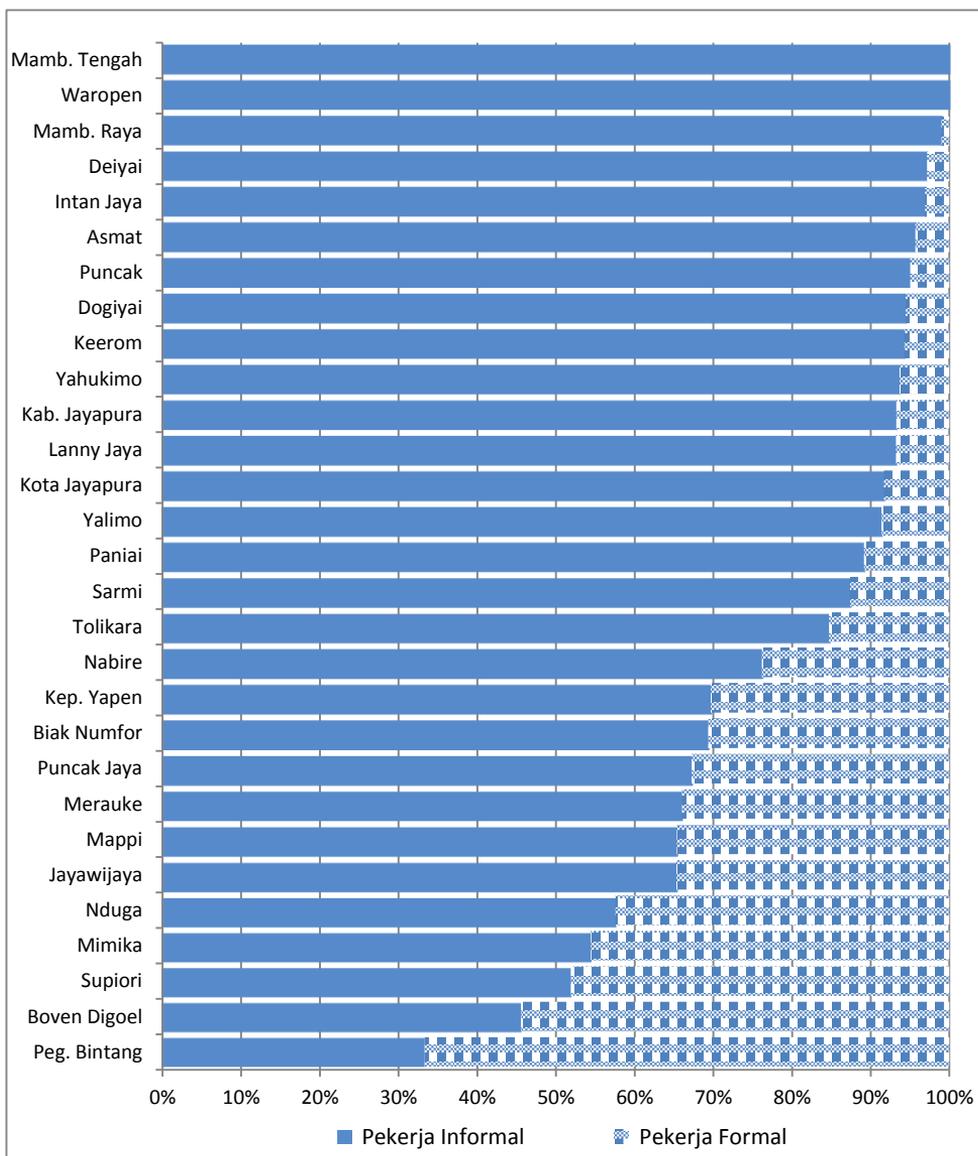
Indikator	2014	%	2015	%
Penduduk 15+ yang bekerja	1 617 437	100	1 672 480	100,00
Laki-laki	939 894	58,11	979 512	58,57
Perempuan	677 543	41,89	692 968	41,43
Perkotaan	323 912	20,03	347 594	20,78
Perdesaan	1 293 525	79,97	1 324 886	79,22
Jumlah pekerja formal	280 222	17,33	309 629	18,51
Laki-laki	211 470	75,47	236 145	76,27
Perempuan	68 752	24,53	73 484	23,73
Perkotaan	193 102	68,91	197 417	63,76
Perdesaan	87 120	31,09	112 212	36,24
Jumlah pekerja informal	1 337 215	82,67	1 362 851	81,49
Laki-laki	728 424	54,47	743 367	54,54
Perempuan	608 791	45,53	619 484	45,46
Perkotaan	130 810	9,78	150 177	11,02
Perdesaan	1 206 405	90,22	1 212 674	88,98

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Selanjutnya, gambar di bawah ini menampilkan sebaran pekerja sektor formal dan informal di masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa ketimpangan yang besar antara persentase pekerja di sektor formal dan Informal di mana persentase sektor informal lebih banyak dibandingkan persentase pekerja sektor formal. Gambar 10 menampilkan diagram batang di mana sebelah kiri

adalah pekerja informal dan sebelah kanan pekerna formal. Nampak bahwa secara umum kabupaten se-Papua penduduknya bekerja pada sektor informal.

Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Catatan: Mengacu pada penentuan pekerja sektoral menggunakan proxy II

3.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDEREMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa *denominator*/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa TPT Papua meningkat pada periode Tahun 2014 terhadap Tahun 2015. Tercatat pada Tahun 2014 TPT provinsi Papua 3,44 persen kemudian meningkat menjadi 3,99 persen pada Tahun 2015. Jika dipilah menurut gender maka dapat diketahui bahwa TPT pekerja laki-laki meningkat dari 3,56 menjadi 4,24 demikian juga pada TPT pekerja perempuan meskipun penurunan TPT hanya 0.35 persen. Hal ini cukup wajar karena pekerja perempuan cenderung termasuk sebagai pekerja dengan status sebagai pekerja keluarga. Selanjutnya jika kita mengamati secara spasial yaitu menurut tempa tinggal, maka TPT pekerja di daerah perkotaan meningkat sekitar 35 persen, sedangkan TPT di daerah perdesaan cenderung menurun.

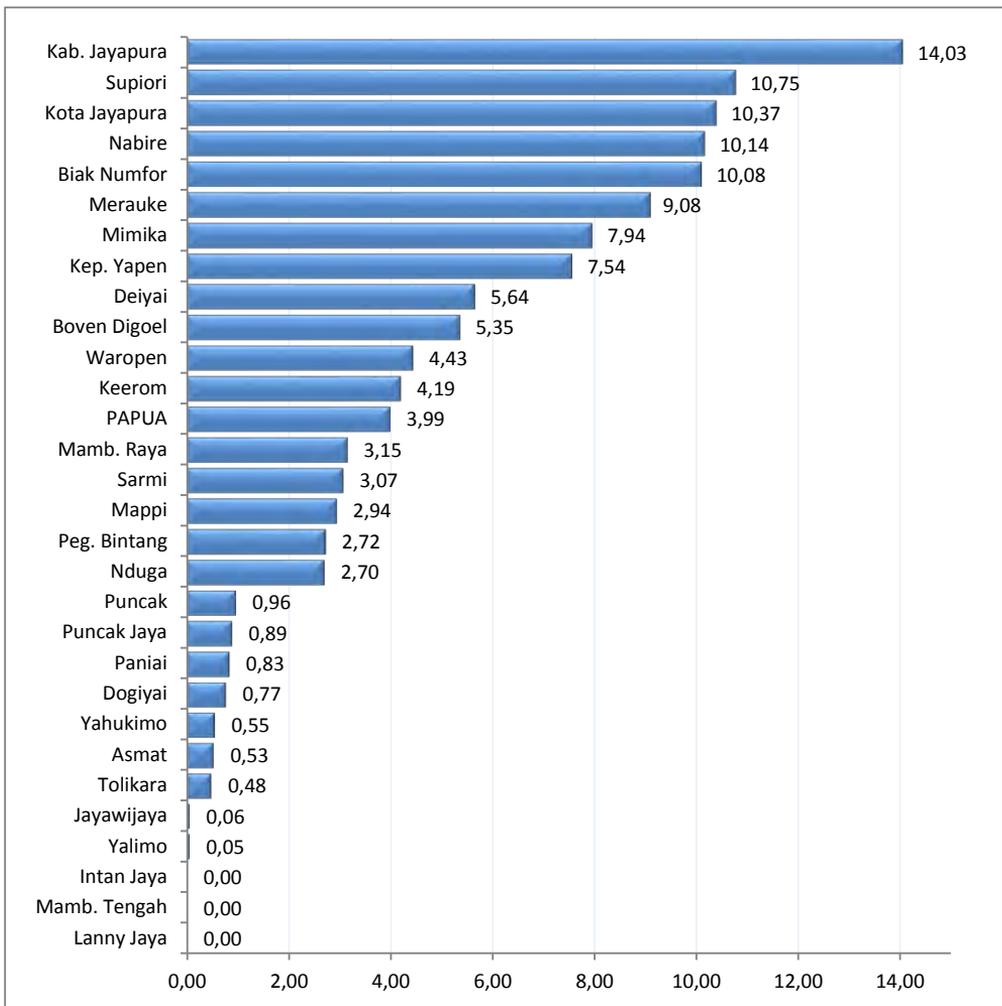
Tabel 9. Indikator Pengangguran Papua, 2014-2015

Indikator	2014	2015
Jumlah Angkatan kerja	1 675 113	1 741 945
Laki-laki	974 604	1 022 857
Perempuan	700 509	719 088
Perkotaan	351 753	389 201
Perdesaan	1 323 360	1 352 744
Jumlah Pengangguran	57 676	69 465
Laki-laki	34 710	43 345
Perempuan	22 966	26 120
Perkotaan	27 841	41 607
Perdesaan	29 835	27 858
TPT	3,44	3,99
Laki-laki	3,56	4,24
Perempuan	3,28	3,63
Perkotaan	7,91	10,69
Perdesaan	2,25	2,06

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Melihat besaran TPT masing-masing Kabupaten/Kota, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada Agustus 2015, TPT tertinggi berada di Kabupaten Jayapura yaitu 14,03 persen, sementara TPT kabupaten yang penganggurannya nol antara lain: Kabupaten Intan Jaya, Mamberamo Tengah, dan Lanny Jaya.

Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

Pengangguran pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “usia muda” mencakup orang yang berusia 15-24 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- Tingkat pengangguran kaum muda
- Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa
- *Share* pengangguran kaum muda terhadap total
- Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pada periode Agustus 2014 ke Agustus 2015, terjadi peningkatan TPT usia muda. Sakernas menunjukkan bahwa TPT usia muda naik dari 9,34 persen menjadi 11,08 persen. Hal serupa terjadi pada TPT penduduk usia muda laki-laki dan perempuan yang masing-masing mengalami peningkatan dari 11,25 persen menjadi 12,63 persen dan 7,78 persen menjadi 9,15 persen pada tahun 2015. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT usia muda di wilayah perkotaan cukup tinggi yakni di atas 35 persen. Kondisi tersebut telah meningkat dari periode 2014 sekitar 26 persen menjadi sekitar 36 persen pada Agustus 2015

Tabel 10. Indikator Pengangguran Usia Muda di Provinsi Papua, 2014-2015

Indikator	2014	2015
TPT Penduduk Umur Muda (%)	9,65	11,08
LAKI-LAKI	11,25	12,63
PEREMPUAN	7,78	9,15
PERKOTAAN	25,88	36,94
PERDESAAN	6,78	5,91
RASIO TPT Umur Muda Terhadap TPT Dewasa	5,69	9,65
LAKI-LAKI	7,04	11,48
PEREMPUAN	4,24	7,51
PERKOTAAN	5,67	10,35
PERDESAAN	7,94	14,76
Share Penganggur Muda Terhadap Total Penganggur (%)	61,55	62,57
LAKI-LAKI	38,64	39,43
PEREMPUAN	22,91	23,14
PERKOTAAN	24,79	34,72
PERDESAAN	36,76	27,86

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Ketika melihat *share* penganggur muda terhadap total penganggur, tampak bahwa banyak penganggur di Papua adalah mereka yang berusia muda. Data menunjukkan bahwa penganggur muda memiliki *share* sebesar 65 persen pada Agustus 2013 dan menurun menjadi sekitar 62 persen pada Agustus 2014.

Melihat *Share* penganggur usia muda terhadap total penganggur, angka yang cukup besar menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda sudah masuk dalam angkatan kerja. Besar kemungkinannya mereka yang telah lulus pendidikan masih mencari pekerjaan untuk mencari pengalaman

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel berikut ini menunjukkan bahwa, pada Agustus 2015 TPT tertinggi menurut pendidikan adalah pada jenjang Sekolah menengah dengan besaran mencapai 8,40 persen, disusul tingkat pendidikan sekolah tinggi, sekolah dasar dan terendah adalah mereka yang tidak pernah sekolah. Padahal pada Agustus 2014 TPT tertinggi adalah pada pendidika sekolah tinggi (PT). Dengan menganalisa data TPT pekerja berdasarkan tingkat pendidikan, maka diperoleh gambaran bahwa mereka yang berpendidikan tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau penguasaannya. Atau bisa juga berdasarkan nilai *income* yang akan diperoleh dari pekerjaan yang dipilih. Selanjutnya semakin rendah tingkat pendidikan maka kemungkinan untuk memilih pekerjaan sesuai selera semakin kecil. Mengenai perubahan yang terjadi, dapat diamati pada periode Agustus 2014 ke Agustus 2015 Tabel 11.

Tabel 11. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Indikator	2014	2015
TOTAL	3,44	3,99
TIDAK PERNAH SEKOLAH	0,90	0,51
LAKI-LAKI	1,66	0,83
PEREMPUAN	0,26	0,23
PERKOTAAN	23,02	4,27
PERDESAAN	0,81	0,46
SEKOLAH DASAR	1,99	1,75
LAKI-LAKI	2,59	1,60
PEREMPUAN	1,18	1,97
PERKOTAAN	2,19	6,56
PERDESAAN	1,96	1,06
SEKOLAH MENENGAH	6,38	8,40
LAKI-LAKI	4,64	7,20
PEREMPUAN	10,89	11,72
PERKOTAAN	8,06	12,21
PERDESAAN	5,13	5,48
SEKOLAH TINGGI	9,88	7,85
LAKI-LAKI	9,55	7,83
PEREMPUAN	10,42	7,90
PERKOTAAN	10,66	9,21
PERDESAAN	7,46	4,87

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

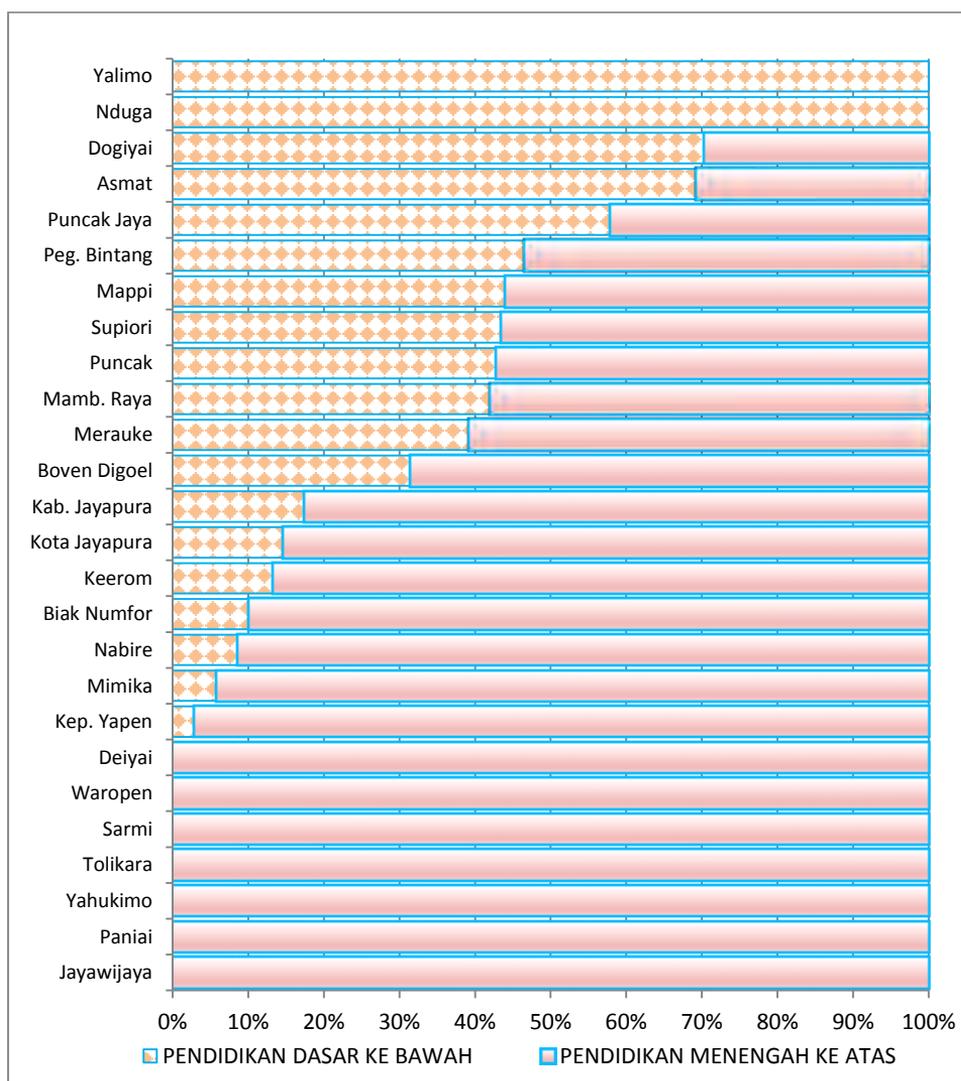
Sakernas menunjukkan bahwa TPT mengalami penurunan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Tidak Pernah Sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan untuk TPT Sekolah Menengah mengalami peningkatan.

Jika dipisahkan menurut jenis kelamin, pada Agustus 2015 jenjang pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi, nilai TPT perempuan lebih

tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki. Namun pada jenjang pendidikan yang lebih rendah yaitu Sekolah Dasar dan Tidak Pernah Sekolah, TPT laki-laki hampir sama jika dibandingkan dengan TPT perempuan.

Sebaran nilai TPT berdasarkan kabupaten/kota, pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa pada masing-masing kabupaten/kota. Pada grafik tersebut tingkat pendidikan dibedakan menjadi dua yakni pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan menengah ke atas.

Gambar 12. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Tampak pada grafik bahwa lebih dari 90 persen pengangguran di Kabupaten Yalimo dan Nduga didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan dasar ke bawah. Perlu kehati-hatian dalam menganalisa grafik tersebut yang disajikan dalam persentase. Seperti diketahui bahwa angka pengangguran di kabupaten/kota cukup rendah khususnya di wilayah pegunungan papua. Hal ini dapat terjadi oleh karena dalam konsep melakukan kegiatan seminggu yang lalu dengan tujuan memperoleh keuntungan/hasil dengan kriteria minimal 1 jam dalam seminggu, maka aktivitas seseorang otomatis termasuk dalam kategori bekerja. Dengan demikian akan dijumpai sedikit sekali jumlah pengangguran di setiap kabupaten terutama yang mayoritas aktivitas ekonominya adalah di sektor pertanian.

KILIM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Agustus 2015 tercatat total setengah pengangguran di Provinsi Papua mencapai 736.871 jiwa. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 yang mencapai 691.723 jiwa. Dari total setengah pengangguran tersebut terdapat 384.460 laki-laki dan sisanya sebanyak 352.411 adalah perempuan. Sebagian besar setengah pengangguran tinggal di perdesaan mencapai 676.719 jiwa.

Persentase setengah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja mencapai kisaran 11,21 persen pada Agustus 2015 yang lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2014 sebesar 14,52 persen. Begitu juga dengan proporsi setengah penganggur dan total penduduk kerja. Pada periode yang sama terjadi penurunan. Setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja menurun dari 15,35 persen pada Agustus 2014 menjadi 11,68 persen pada Agustus 2015.

Tabel 12. Indikator Setengah Penganggur, 2015

Indikator	2014	2015
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Angkatan Kerja	14,52	11,21
LAKI-LAKI	15,27	11,94
PEREMPUAN	13,46	10,17
PERKOTAAN	2,96	3,46
PERDESAAN	17,59	13,44
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Total Penduduk Bekerja	15,03	11,68
LAKI-LAKI	15,84	12,47
PEREMPUAN	13,92	10,56
PERKOTAAN	3,21	3,88
PERDESAAN	17,99	13,72

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu

berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan, 2014-2015

Indikator	2014	2015
Penduduk 15 tahun ke atas	2 129 404	2189 230
Laki-laki	1 135 567	1166 792
Perempuan	993 837	1022 438
Perkotaan	565 347	614 640
Perdesaan	1 564 057	1574 590
Bukan angkatan kerja	454 291	447 285
Laki-laki	160 963	143 935
Perempuan	293 328	303 350
Perkotaan	213 594	225 439
Perdesaan	240 697	221 846
Tingkat ketidakaktifan	21,33	20,43
Laki-laki	14,17	12,34
Perempuan	29,51	29,67
Perkotaan	37,78	36,68
Perdesaan	15,39	14,09

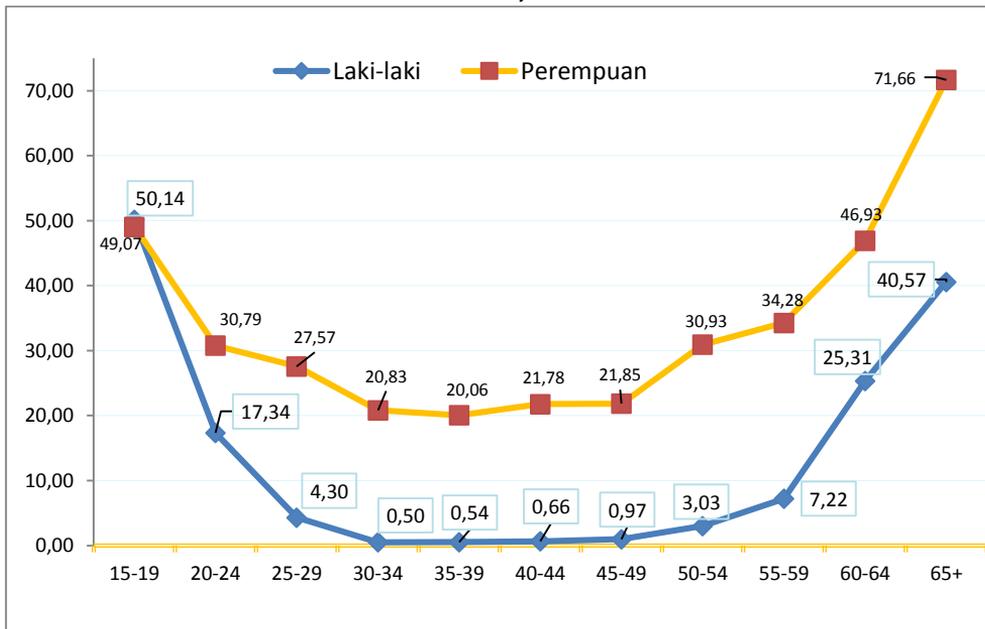
Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Pada periode Agustus 2014-2015 tingkat ketidakaktifan secara umum tidak begitu berbeda. Hal ini nampak dari kondisi 2014 sebesar 21,33 persen berubah tipis menjadi 20,43 persen pada 2015. Berdasarkan Jenis Kelamin, laki-laki mengalami penurunan tingkat ketidakaktifan dari 14,17 persen di Agustus 2014 menjadi 12,34 pada Agustus 2015. Sedangkan perempuan mengalami peningkatan tingkat ketidakaktifan yang relatif kecil yaitu dari 29,51 persen pada Agustus 2014 menjadi 29,67 persen pada Agustus 2015.

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk perkotaan mengalami penurunan tingkat ketidakaktifan dari 37,78 persen pada Agustus 2014 menjadi 36,68 persen pada Agustus 2015. Hal yang sama juga terjadi di wilayah perdesaan untuk periode yang sama yaitu semula 15,39 menjadi 14,09 pada tahun 2015.

Informasi lain terkait pola ketidakaktifan menurut kelompok umur dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Dapat dilihat bahwa pola ketidakaktifan yang berbentuk huruf "U" mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk usia muda, lalu turun pada usia produktif dan kembali meningkat pada usia-usia tua. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, namun dapat dilihat bahwa pada laki-laki, semakin menuju ke usia produktif, maka semakin curam grafiknya atau dengan kata lain semakin rendah tingkat ketidakaktifannya berbeda pada wanita yang tidak lebih curam dibandingkan pada laki-laki.

Gambar 13. Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Sakernas 2016, data diolah

3.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi).

Tabel 14. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2014-2015

Indikator	2014	2015
Tidak pernah sekolah	6,35	5,63
Laki-laki	3,67	3,22
Perempuan	8,55	7,65
Perkotaan	51,27	33,25
Perdesaan	6,00	5,12
Sekolah dasar	23,92	24,89
Laki-laki	15,55	15,89
Perempuan	32,86	35,11
Perkotaan	44,99	47,30
Perdesaan	20,18	20,00
Sekolah menengah	33,41	32,03
Laki-laki	20,87	17,97
Perempuan	52,71	53,83
Perkotaan	42,00	40,45
Perdesaan	25,07	23,73
Sekolah tinggi	9,82	12,32
Laki-laki	6,09	7,83
Perempuan	15,31	19,08
Perkotaan	10,68	15,00
Perdesaan	7,06	5,79

Sumber: Sakernas 2016, data diolah

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015 menunjukkan tidak adanya perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan. Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara Agustus 2014 ke Agustus 2015 relatif tidak mengalami perubahan berarti yaitu masih didominasi oleh jenjang pendidikan Sekolah Menengah.

Apabila dibedakan menurut gender, maka secara umum perubahan indikator Ketidakaktifan pada setiap level pendidikan tidak begitu berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan penduduk perempuan cenderung stabil pada seluruh jenjang pendidikan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal maka pada periode yang sama, tingkat ketidakaktifan penduduk di wilayah Perkotaan berkurang sekitar 18 persen pada kategori tidak pernah sekolah. Penurunan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Sebaliknya terjadi kenaikan ketidakaktifan sekitar 5 persen pada level pendidikan sekolah tinggi. Untuk wilayah pedesaan variasi naik turunnya persentase ketidakaktifan tidak begitu signifikan. Hal itu juga mengindikasikan bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) cenderung stabil dan meningkat secara proporsional terhadap bertambahnya jumlah penduduk usia kerja.

TABEL LAMPIRAN



Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	79.700	71.178	150.878	81.402	72.996	154.398
Jayawijaya	75.117	72.429	147.546	77.960	73.382	151.342
Kab. Jayapura	45.256	38.935	84.191	46.445	39.922	86.367
Nabire	N.A	N.A	N.A	54.861	45.796	100.657
Kep. Yapen	31.070	29.164	60.234	31.939	29.857	61.796
Biak Numfor	48.079	44.837	92.916	50.050	46.045	96.095
Paniai	57.468	53.479	110.947	58.717	54.208	112.925
Puncak Jaya	45.279	38.162	83.441	46.539	39.283	85.822
Mimika	82.427	58.578	141.005	84.160	59.674	143.834
Boven Digoel	23.171	17.886	41.057	23.880	18.690	42.570
Mappi	29.167	26.582	55.749	29.493	27.989	57.482
Asmat	27.573	25.609	53.182	28.033	26.942	54.975
Yahukimo	62.510	57.030	119.540	63.670	58.846	122.516
Peg. Bintang	25.081	21.613	46.694	25.217	22.447	47.664
Tolikara	46.909	40.035	86.944	48.595	41.310	89.905
Sarmi	13.824	10.993	24.817	14.108	11.634	25.742
Keerom	21.043	16.525	37.568	21.293	17.083	38.376
Waropen	9.803	8.828	18.631	9.936	9.333	19.269
Supiori	5.676	5.041	10.717	5.906	5.711	11.617
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	6.803	6.488	13.291
Nduga	32.522	25.916	58.438	33.474	26.730	60.204
Lanny Jaya	61.708	52.862	114.570	62.743	54.533	117.276
Mamb. Tengah	16.474	14.077	30.551	16.658	14.772	31.430
Yalimo	N.A	N.A	N.A	22.404	19.204	41.608
Puncak	35.940	33.130	69.070	36.994	34.075	71.069
Dogiyai	29.180	29.358	58.538	29.693	30.358	60.051
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	16.303	15.452	31.755
Deiyai	23.091	22.203	45.294	23.975	22.679	46.654
Kota Jayapura	110.075	95.686	205.761	115.541	96.999	212.540
PROV. PAPUA	1.135.567	993.837	2.129.404	1166.792	1022.438	2189.230

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur
Tahun 2014 dan 2015

Indikator	2014	2015
15 Tahun ke atas	2.129.404	45,875
Laki-laki	1.135.567	26,344
Perempuan	993.837	19,531
Perkotaan	1.135.567	19,374
Perdesaan	993.837	26,501
(15-24)	616.745	620,676
Laki-laki	325.333	328,505
Perempuan	291.412	292,171
Perkotaan	161.286	171,244
Perdesaan	455.459	449,432
(15-64)	2.086.965	2,143,355
Laki-laki	1.111.379	1,140,448
Perempuan	975.586	1,002,907
Perkotaan	547.598	595,266
Perdesaan	1.539.367	1,548,089
(25-54)	1.361.095	1,404,093
Laki-laki	721.308	741,395
Perempuan	639.787	662,698
Perkotaan	349.467	381,751
Perdesaan	1.011.628	1,022,342
(25-34)	562.240	570,490
Laki-laki	288.860	293,030
Perempuan	273.380	277,460
Perkotaan	149.413	160,480
Perdesaan	412.827	410,010
(35-54)	798.855	833,603
Laki-laki	432.448	448,365
Perempuan	366.407	385,238
Perkotaan	200.054	221,271
Perdesaan	598.801	612,332
(55-64)	109.125	118,586
Laki-laki	64.738	70,548
Perempuan	44.387	48,038
Perkotaan	36.845	50,589
Perdesaan	72.280	36,470
65 Tahun ke atas	42.439	45,875
Laki-laki	24.188	26,344
Perempuan	18.251	19,531
Perkotaan	17.749	19,374
Perdesaan	24.690	26,501

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	67.927	44.017	111.944	71,080	37,460	108,540
Jayawijaya	65.587	64.011	129.598	69,538	63,898	133,436
Kab. Jayapura	35.248	15.689	50.937	35,179	16,917	52,096
Nabire	N.A	N.A	N.A	45,926	23,548	69,474
Kep. Yapen	25.130	17.312	42.442	26,231	16,214	42,445
Biak Numfor	36.477	22.296	58.773	38,297	19,030	57,327
Paniai	52.447	49.104	101.551	54,614	51,503	106,117
Puncak Jaya	39.694	33.372	73.066	44,933	35,981	80,914
Mimika	70.290	13.779	84.069	72,755	21,823	94,578
Boven Digoel	20.183	7.666	27.849	21,307	10,308	31,615
Mappi	26.094	22.596	48.690	25,687	21,218	46,905
Asmat	22.216	19.012	41.228	24,193	18,234	42,427
Yahukimo	58.296	52.815	111.111	59,130	51,636	110,766
Peg. Bintang	24.605	20.867	45.472	24,108	21,511	45,619
Tolikara	40.246	35.189	75.435	47,271	39,970	87,241
Sarmi	11.934	7.509	19.443	11,446	7,141	18,587
Keerom	17.526	9.592	27.118	18,850	11,167	30,017
Waropen	8.333	2.215	10.548	7,982	2,446	10,428
Supiori	4.195	1.740	5.935	4,366	2,371	6,737
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	6,068	4,613	10,681
Nduga	32.297	25.733	58.030	32,931	26,413	59,344
Lanny Jaya	57.352	51.572	108.924	58,202	51,700	109,902
Mamb. Tengah	16.474	13.795	30.269	16,424	14,677	31,101
Yalimo	N.A	N.A	N.A	22,404	19,077	41,481
Puncak	34.021	28.343	62.364	34,318	27,979	62,297
Dogiyai	25.147	22.680	47.827	27,262	28,821	56,083
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	14,938	12,048	26,986
Deiyai	22.381	22.118	44.499	21,497	20,365	41,862
Kota Jayapura	79.573	37.704	117.277	85,920	41,019	126,939
PROV. PAPUA	974.604	700.509	1.675.113	1,022,857	719,088	1,741,945

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level
Kabupaten

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2014 dan 2015

Indikator	2014	2015
15 Tahun ke atas	1.675.113	1,741,945
Laki-laki	974.604	1,022,857
Perempuan	700.509	719,088
Perkotaan	351.753	389,201
Perdesaan	1.323.360	1,352,744
(15-24)	367.831	392,474
Laki-laki	198.030	216,869
Perempuan	169.801	175,605
Perkotaan	55.243	65,292
Perdesaan	312.588	327,182
(15-64)	1.658.039	1,720,754
Laki-laki	961.850	1,007,201
Perempuan	696.189	713,553
Perkotaan	345.983	383,636
Perdesaan	1.312.056	1,337,118
(25-54)	1.210.181	1,237,782
Laki-laki	710.869	729,261
Perempuan	499.312	508,521
Perkotaan	268.277	290,856
Perdesaan	941.904	946,926
(25-34)	495.447	495,889
Laki-laki	282.897	285,826
Perempuan	212.550	210,063
Perkotaan	115.290	120,854
Perdesaan	380.157	375,035
(35-54)	714.734	741,893
Laki-laki	427.972	443,435
Perempuan	286.762	298,458
Perkotaan	152.987	170,002
Perdesaan	561.747	571,891
(55-64)	80.027	90,498
Laki-laki	52.951	61,071
Perempuan	27.076	29,427
Perkotaan	22.463	33,765
Perdesaan	57.564	14,524
65 Tahun ke atas	17.074	21,191
Laki-laki	12.754	15,656
Perempuan	4.320	5,535
Perkotaan	5.770	5,565
Perdesaan	11.304	15,626

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	85,23	61,84	74,20	87.32	51.32	70.30
Jayawijaya	87,31	88,38	87,84	89.20	87.08	88.17
Kab. Jayapura	77,89	40,30	60,50	75.74	42.38	60.32
Nabire	N.A	N.A	N.A	0.00	59.70	69.02
Kep. Yapen	80,88	59,36	70,46	82.13	54.31	68.69
Biak Numfor	75,87	49,73	63,25	76.52	41.33	59.66
Paniai	91,26	91,82	91,53	93.01	95.01	93.97
Puncak Jaya	87,67	87,45	87,57	96.55	91.59	94.28
Mimika	85,28	23,52	59,62	86.45	36.57	65.75
Boven Digoel	87,10	42,86	67,83	89.23	55.15	74.27
Mappi	89,46	85,00	87,34	87.10	75.81	81.60
Asmat	80,57	74,24	77,52	86.30	67.68	77.18
Yahukimo	93,26	92,61	92,95	92.87	87.75	90.41
Peg. Bintang	98,10	96,55	97,38	95.60	95.83	95.71
Tolikara	85,80	87,90	86,76	97.28	96.76	97.04
Sarmi	86,33	68,31	78,35	81.13	61.38	72.20
Keerom	83,29	58,05	72,18	88.53	65.37	78.22
Waropen	85,00	25,09	56,62	80.33	26.21	54.12
Supiori	73,91	34,52	55,38	73.92	41.52	57.99
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	89.20	71.10	80.36
Nduga	99,31	99,29	99,30	98.38	98.81	98.57
Lanny Jaya	92,94	97,56	95,07	92.76	94.80	93.71
Mamb. Tengah	100,00	98,00	99,08	98.60	99.36	98.95
Yalimo	N.A	N.A	N.A	0.00	99.34	99.69
Puncak	94,66	85,55	90,29	92.77	82.11	87.66
Dogiyai	86,18	77,25	81,70	91.81	94.94	93.39
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	91.63	77.97	84.98
Deiyai	96,93	99,62	98,24	89.66	89.80	89.73
Kota Jayapura	72,29	39,40	57,00	74.36	42.29	59.72
PROV. PAPUA	85,83	70,49	78,67	87.66	70.33	79.57

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015

Kabupaten/ kota	2014			2015		
	Laki- laki	Perempuan	Total	Laki- laki	Perempuan	Total
Merauke	66.117	41.601	107.718	65,299	33,389	98,688
Jayawijaya	65.242	64.011	129.253	69,538	63,823	133,361
Kab. Jayapura	31.235	12.656	43.891	29,956	14,830	44,786
Nabire	N.A	N.A	N.A	41,915	20,513	62,428
Kep. Yapen	23.638	16.484	40.122	24,692	14,552	39,244
Biak Numfor	34.344	18.963	53.307	34,671	16,879	51,550
Paniai	52.447	49.104	101.551	53,847	51,384	105,231
Puncak Jaya	39.256	33.162	72.418	44,587	35,608	80,195
Mimika	68.712	11.427	80.139	67,563	19,507	87,070
Boven Digoel	18.811	6.964	25.775	20,275	9,649	29,924
Mappi	21.812	21.391	43.203	24,888	20,640	45,528
Asmat	22.216	18.920	41.136	24,108	18,095	42,203
Yahukimo	58.081	52.815	110.896	58,522	51,636	110,158
Peg. Bintang	24.013	20.422	44.435	23,381	20,997	44,378
Tolikara	39.130	34.924	74.054	46,977	39,843	86,820
Sarmi	11.477	7.181	18.658	11,213	6,804	18,017
Keerom	17.290	9.228	26.518	18,243	10,516	28,759
Waropen	7.854	1.928	9.782	7,742	2,224	9,966
Supiori	3.470	1.323	4.793	4,002	2,011	6,013
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	6,040	4,305	10,345
Nduga	29.147	25.733	54.880	31,330	26,413	57,743
Lanny Jaya	57.352	51.572	108.924	58,202	51,700	109,902
Mamb. Tengah	16.474	13.795	30.269	16,424	14,677	31,101
Yalimo	N.A	N.A	N.A	22,382	19,077	41,459
Puncak	33.733	27.857	61.590	34,160	27,537	61,697
Dogiyai	23.876	22.221	46.097	26,831	28,821	55,652
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	14,938	12,048	26,986
Deiyai	22.381	22.118	44.499	20,335	19,165	39,500
Kota Jayapura	72.961	33.115	106.076	77,451	36,325	113,776
PROV. PAPUA	939.894	677.543	1.617.437	979,512	692,968	1,672,480

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia, sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	82,96	58,45	71,39	42.29	21.63	63.92
Jayawijaya	86,85	88,38	87,60	45.95	42.17	88.12
Kab. Jayapura	69,02	32,51	52,13	34.68	17.17	51.86
Nabire	N.A	N.A	N.A	41.64	20.38	62.02
Kep. Yapen	76,08	56,52	66,61	39.96	23.55	63.51
Biak Numfor	71,43	42,29	57,37	36.08	17.56	53.64
Paniai	91,26	91,82	91,53	47.68	45.50	93.19
Puncak Jaya	86,70	86,90	86,79	51.95	41.49	93.44
Mimika	83,36	19,51	56,83	46.97	13.56	60.54
Boven Digoel	81,18	38,94	62,78	47.63	22.67	70.29
Mappi	74,78	80,47	77,50	43.30	35.91	79.20
Asmat	80,57	73,88	77,35	43.85	32.91	76.77
Yahukimo	92,91	92,61	92,77	47.77	42.15	89.91
Peg. Bintang	95,74	94,49	95,16	49.05	44.05	93.11
Tolikara	83,42	87,23	85,17	52.25	44.32	96.57
Sarmi	83,02	65,32	75,18	43.56	26.43	69.99
Keerom	82,17	55,84	70,59	47.54	27.40	74.94
Waropen	80,12	21,84	52,50	40.18	11.54	51.72
Supiori	61,13	26,24	44,72	34.45	17.31	51.76
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	45.44	32.39	77.83
Nduga	89,62	99,29	93,91	52.04	43.87	95.91
Lanny Jaya	92,94	97,56	95,07	49.63	44.08	93.71
Mamb. Tengah	100.00	98,00	99,08	52.26	46.70	98.95
Yalimo	N.A	N.A	N.A	53.79	45.85	99.64
Puncak	93,86	84,08	89,17	48.07	38.75	86.81
Dogiyai	81,82	75,69	78,75	44.68	47.99	92.67
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	47.04	37.94	84.98
Deiyai	96,93	99,62	98,24	43.59	41.08	84.67
Kota Jayapura	66,28	34,61	51,55	36.44	17.09	53.53
PROV. PAPUA	82,77	68,17	75,96	44.74	31.65	76.40

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Bekerja dengan upah/gaji		Pengusaha		Berusaha sendiri+Berusaha dibantu buruh tak tetap/Tak dibayar	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	25,50%	34.92%	3,89%	3.05%	37,8%	37.70%
Jayawijaya	7,13%	7.22%	0,00%	0.18%	41,4%	45.97%
Kab. Jayapura	34,65%	29.13%	1,89%	2.39%	50,1%	46.46%
Nabire	0,00%	46.03%	N.A	2.95%	N.A	32.50%
Kep. Yapen	25,47%	29.16%	1,06%	0.84%	42,6%	49.51%
Biak Numfor	46,87%	39.72%	2,38%	0.47%	35,7%	47.05%
Paniai	0,98%	5.56%	0,00%	0.00%	40,0%	40.96%
Puncak Jaya	0,64%	7.41%	0,00%	0.23%	45,5%	36.83%
Mimika	51,46%	44.59%	1,10%	1.93%	42,1%	43.24%
Boven Digoel	33,61%	19.61%	1,66%	0.95%	31,5%	48.66%
Mappi	6,35%	12.45%	0,59%	1.77%	67,4%	69.77%
Asmat	7,14%	3.28%	0,56%	1.04%	48,3%	55.79%
Yahukimo	2,26%	2.97%	0,11%	0.11%	45,9%	43.46%
Peg. Bintang	4,26%	10.58%	0,50%	1.46%	36,3%	35.57%
Tolikara	3,81%	4.97%	0,00%	0.00%	45,7%	45.98%
Sarmi	18,73%	21.21%	0,83%	0.00%	42,9%	46.43%
Keerom	33,40%	26.10%	0,89%	3.01%	40,5%	38.04%
Waropen	30,35%	33.70%	0,37%	0.00%	48,1%	53.86%
Supiori	22,57%	31.43%	1,96%	0.45%	54,9%	50.84%
Mamb. Raya	N.A	5.53%	N.A	0.26%	N.A	46.60%
Nduga	0,15%	0.00%	0,00%	0.00%	41,3%	39.06%
Lanny Jaya	0,13%	2.74%	0,00%	0.00%	45,1%	45.89%
Mamb. Tengah	0,86%	4.01%	0,00%	0.00%	42,2%	42.25%
Yalimo	N.A	0.00%	N.A	0.00%	N.A	37.74%
Puncak	1,15%	6.79%	0,00%	0.00%	44,8%	35.72%
Dogiyai	1,16%	1.06%	0,20%	0.00%	47,8%	53.46%
Intan Jaya	N.A	4.27%	N.A	6.48%	N.A	44.16%
Deiyai	0,00%	5.21%	0,25%	0.90%	52,8%	51.55%
Kota Jayapura	64,64%	62.17%	3,04%	1.73%	24,1%	28.27%
PROV. PAPUA	16,50%	17.56%	0,82%	0.95%	41,9%	42.91%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014 dan 2015 (Lanjutan...)

Kabupaten/kota	Pekerja Bebas		Pekerja Keluarga		Pekerja Rentan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	7,3%	3.65%	25,5%	20.7%	55,3%	62.03%
Jayawijaya	0,3%	0.06%	51,2%	46.6%	57,4%	92.61%
Kab. Jayapura	6,4%	8.27%	7,0%	13.8%	51,0%	68.47%
Nabire	N.A	1.39%	N.A	17.1%	N.A	51.02%
Kep. Yapen	0,5%	2.02%	30,3%	18.5%	51,2%	70.01%
Biak Numfor	2,0%	3.71%	13,0%	9.0%	35,8%	59.80%
Paniai	0,0%	0.93%	59,0%	52.5%	60,9%	94.44%
Puncak Jaya	0,0%	0.00%	53,9%	55.5%	60,0%	92.36%
Mimika	0,3%	1.96%	5,1%	8.3%	47,0%	53.49%
Boven Digoel	16,4%	5.41%	16,9%	25.4%	48,0%	79.44%
Mappi	1,5%	1.63%	24,2%	14.4%	70,7%	85.77%
Asmat	1,5%	3.66%	42,5%	36.2%	53,0%	95.68%
Yahukimo	0,0%	0.00%	51,7%	53.5%	59,2%	96.92%
Peg. Bintang	0,0%	1.12%	59,0%	51.3%	62,3%	87.96%
Tolikara	5,2%	0.00%	45,3%	49.1%	52,9%	95.03%
Sarmi	1,1%	2.12%	36,5%	30.2%	50,8%	78.79%
Keerom	0,2%	0.69%	24,9%	32.2%	43,6%	70.89%
Waropen	1,8%	0.00%	19,4%	12.4%	59,2%	66.30%
Supiori	8,5%	7.53%	12,1%	9.7%	48,8%	68.12%
Mamb. Raya	N.A	0.18%	N.A	47.4%	N.A	94.21%
Nduga	0,0%	0.00%	58,6%	60.9%	58,6%	100.00%
Lanny Jaya	0,0%	0.00%	54,8%	51.4%	54,8%	97.26%
Mamb. Tengah	0,0%	0.00%	56,9%	53.7%	56,9%	95.99%
Yalimo	N.A	0.00%	N.A	62.3%	N.A	100.00%
Puncak	0,0%	0.00%	54,1%	57.5%	61,4%	93.21%
Dogiyai	0,0%	4.12%	50,8%	41.4%	54,9%	98.94%
Intan Jaya	N.A	0.23%	N.A	44.8%	N.A	89.24%
Deiyai	0,0%	0.00%	46,9%	42.3%	73,4%	93.89%
Kota Jayapura	1,3%	2.32%	6,9%	5.5%	25,6%	36.10%
PROV. PAPUA	1,6%	1.44%	39,1%	37.1%	53,7%	81.49%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
Merauke	47,0%	11,1%	41,9%	51.70%	12.49%	35.82%
Jayawijaya	84,6%	0,3%	15,1%	90.28%	0.56%	9.17%
Kab. Jayapura	45,5%	8,5%	46,1%	50.54%	10.70%	38.76%
Nabire	N.A	N.A	N.A	34.49%	12.40%	53.11%
Kep. Yapen	57,3%	5,9%	36,9%	57.19%	6.45%	36.36%
Biak Numfor	16,4%	19,0%	64,5%	40.81%	9.31%	49.88%
Paniai	96,6%	0,4%	3,0%	87.73%	0.37%	11.90%
Puncak Jaya	89,5%	0,0%	10,5%	90.32%	0.26%	9.42%
Mimika	21,2%	29,3%	49,5%	26.03%	19.21%	54.76%
Boven Digoel	63,2%	2,7%	34,0%	64.00%	8.27%	27.74%
Mappi	83,6%	0,9%	15,4%	84.25%	6.18%	9.57%
Asmat	84,5%	1,6%	13,9%	92.18%	0.14%	7.67%
Yahukimo	90,1%	0,1%	9,8%	96.39%	0.41%	3.20%
Peg. Bintang	90,1%	0,4%	9,5%	83.24%	1.06%	15.70%
Tolikara	88,2%	0,0%	11,8%	92.67%	0.00%	7.33%
Sarmi	72,9%	4,3%	22,8%	68.55%	5.82%	25.63%
Keerom	54,1%	8,1%	37,8%	70.74%	7.54%	21.72%
Waropen	57,8%	4,2%	38,0%	58.47%	2.50%	39.03%
Supiori	58,7%	15,8%	25,6%	53.32%	10.08%	36.60%
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	90.91%	0.36%	8.73%
Nduga	96,2%	0,0%	3,8%	100.00%	0.00%	0.00%
Lanny Jaya	95,3%	0,0%	4,7%	97.09%	0.00%	2.91%
Mamb. Tengah	92,3%	0,0%	7,7%	95.41%	0.00%	4.59%
Yalimo	N.A	0,0%	N.A	100.00%	0.00%	0.00%
Puncak	87,3%	,2%	12,6%	93.16%	0.96%	5.88%
Dogiyai	92,5%	0,0%	7,5%	99.34%	0.00%	0.66%
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	97.08%	0.14%	2.78%
Deiyai	90,5%	0,0%	9,5%	91.67%	1.17%	7.15%
Kota Jayapura	11,0%	10,5%	78,5%	7.21%	13.25%	79.53%
PROV. PAPUA	70,6%	4,6%	24,8%	73.93%	4.59%	21.47%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Pekerja Paruh Waktu		Tingkat Pekerja Paruh Waktu		Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (Persen)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	37.927	26,433	35,21	82.07	34,65	61.50
Jayawijaya	29.186	39,666	22,58	80.66	48,84	55.35
Kab. Jayapura	11.016	8,793	25,10	60.05	24,34	51.11
Nabire	N.A	8,082	N.A	66.53	N.A	56.88
Kep. Yapen	19.923	11,476	49,66	52.76	27,06	54.34
Biak Numfor	11.443	8,960	21,47	65.18	26,72	47.11
Paniai	35.473	44,312	34,93	81.72	49,19	53.00
Puncak Jaya	65.167	34,524	89,99	58.73	8,33	58.61
Mimika	8.443	13,868	10,54	96.47	13,24	46.24
Boven Digoel	3.467	3,968	13,45	47.00	22,90	47.68
Mappi	25.499	9,754	59,02	54.48	17,58	70.04
Asmat	12.966	24,768	31,52	80.80	34,52	53.75
Yahukimo	67.604	64,853	60,96	86.13	38,23	50.33
Peg. Bintang	19.536	6,881	43,97	48.63	38,35	58.73
Tolikara	62.369	38,894	84,22	75.81	68,26	54.39
Sarmi	11.446	7,126	61,35	56.08	24,60	65.75
Keerom	8.863	7,451	33,42	58.72	24,09	65.41
Waropen	4.616	3,194	47,19	81.07	12,86	23.11
Supiori	2.944	2,376	61,42	66.22	17,47	34.60
Mamb. Raya	N.A	4,611	N.A	64.19	N.A	59.31
Nduga	22.868	9,587	41,67	48.66	54,52	33.36
Lanny Jaya	42.153	31,887	38,70	90.97	48,80	42.74
Mamb. Tengah	8.709	19,451	28,77	99.53	54,39	19.97
Yalimo	N.A	9,467	N.A	88.72	N.A	40.25
Puncak	60.258	26,242	97,84	53.42	22,45	54.62
Dogiyai	31.052	32,447	67,36	92.31	46,31	59.62
Intan Jaya	N.A	6,286	N.A	39.65	N.A	47.84
Deiyai	31.845	24,946	71,56	87.46	56,06	42.24
Kota Jayapura	12.069	11,288	11,38	78.79	28,67	52.27
PROV. PAPUA	691.723	541,591	42,77	73.50	36,54	51.56

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	0 JAM*		1-14 JAM		15-24 JAM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	1,9%	6.5%	3,2%	2.2%	15,0%	11.9%
Jayawijaya	0,0%	0.0%	0,8%	1.8%	2,3%	8.4%
Kab. Jayapura	0,5%	1.3%	3,4%	4.1%	6,4%	11.1%
Nabire	N.A	.8%	N.A	1.4%	N.A	4.3%
Kep. Yapen	0,7%	3.1%	2,2%	3.9%	15,2%	18.9%
Biak Numfor	4,1%	1.4%	6,1%	1.3%	5,7%	11.2%
Paniai	0,0%	0.0%	5,1%	.7%	11,6%	6.2%
Puncak Jaya	0,0%	0.0%	13,9%	6.9%	52,9%	42.8%
Mimika	0,0%	.3%	.8%	2.2%	4,5%	5.4%
Boven Digoel	1,0%	1.0%	0,0%	1.6%	4,1%	13.0%
Mappi	0,5%	0.0%	1,6%	2.1%	21,7%	11.5%
Asmat	0,0%	0.0%	1,1%	8.6%	13,5%	31.5%
Yahukimo	0,0%	0.0%	0,2%	.6%	5,7%	12.9%
Peg. Bintang	0,0%	.9%	5,1%	4.3%	12,4%	9.5%
Tolikara	0,2%	.1%	5,6%	.8%	43,0%	10.5%
Sarmi	4,2%	5.6%	4,6%	8.0%	26,3%	37.0%
Keerom	0,9%	.7%	4,9%	8.9%	12,7%	13.8%
Waropen	0,7%	0.0%	2,6%	3.8%	15,9%	18.2%
Supiori	0,0%	5.9%	9,0%	6.7%	26,4%	30.2%
Mamb. Raya	N.A	0.0%	N.A	2.7%	N.A	26.4%
Nduga	0,0%	0.0%	3,3%	1.3%	16,1%	8.5%
Lanny Jaya	0,0%	0.0%	1,5%	4.8%	2,2%	5.7%
Mamb. Tengah	0,0%	0.0%	0,7%	11.3%	9,0%	9.5%
Yalimo	N.A	0.0%	N.A	.4%	N.A	8.9%
Puncak	0,0%	.2%	11,5%	20.6%	54,9%	44.5%
Dogiyai	0,0%	0.0%	0,4%	3.4%	25,5%	17.6%
Intan Jaya	N.A	0.0%	N.A	0.0%	N.A	16.9%
Deiyai	0,0%	0.0%	2,2%	.2%	25,6%	19.8%
Kota Jayapura	0,0%	.8%	1,0%	.9%	3,7%	3.8%
PROV. PAPUA	0,5%	.8%	3,2%	3.4%	15,0%	13.6%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2014 dan 2015 (Lanjutan)

Kabupaten/kota	25-34 JAM		35-39 JAM		40-48 JAM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	17,0%	18.5%	6,8%	14.1%	31,6%	27.2%
Jayawijaya	19,5%	26.7%	38,5%	25.4%	38,9%	37.2%
Kab. Jayapura	15,3%	17.5%	13,6%	21.4%	41,2%	32.7%
Nabire	N.A	13.8%	N.A	14.8%	N.A	37.1%
Kep. Yapen	32,3%	32.7%	17,2%	16.6%	18,9%	14.2%
Biak Numfor	9,7%	14.1%	12,6%	21.7%	29,7%	28.4%
Paniai	18,2%	44.6%	24,1%	9.4%	39,1%	31.2%
Puncak Jaya	23,2%	23.6%	7,4%	9.2%	2,4%	15.0%
Mimika	5,2%	9.0%	11,2%	8.9%	27,7%	27.8%
Boven Digoel	9,4%	13.6%	9,7%	23.7%	26,8%	31.2%
Mappi	35,7%	25.8%	15,8%	40.0%	16,5%	17.1%
Asmat	16,9%	32.6%	22,3%	16.1%	31,9%	10.8%
Yahukimo	55,0%	54.9%	23,8%	22.8%	14,7%	7.8%
Peg. Bintang	26,5%	18.1%	42,6%	50.6%	13,2%	14.8%
Tolikara	35,6%	47.9%	14,3%	21.1%	1,3%	19.6%
Sarmi	30,5%	25.5%	13,3%	11.3%	10,8%	6.4%
Keerom	15,9%	21.4%	17,7%	24.2%	34,7%	24.4%
Waropen	28,7%	17.5%	25,8%	14.3%	21,3%	39.0%
Supiori	26,1%	22.8%	15,5%	6.1%	18,6%	19.4%
Mamb. Raya	N.A	40.3%	N.A	27.6%	N.A	1.2%
Nduga	22,3%	24.3%	34,4%	36.5%	24,0%	29.4%
Lanny Jaya	35,0%	21.4%	33,3%	46.9%	28,0%	21.1%
Mamb. Tengah	19,0%	42.0%	46,8%	26.8%	24,4%	10.4%
Yalimo	N.A	16.5%	N.A	42.1%	N.A	32.1%
Puncak	31,4%	14.5%	,4%	6.0%	1,0%	13.9%
Dogiyai	41,4%	42.2%	15,6%	24.3%	15,4%	12.6%
Intan Jaya	N.A	41.8%	N.A	15.8%	N.A	25.3%
Deiyai	43,7%	52.2%	5,5%	20.3%	22,8%	3.0%
Kota Jayapura	6,6%	7.9%	9,7%	11.8%	47,1%	37.8%
PROV. PAPUA	24,6%	27.1%	19,9%	21.7%	25,8%	23.6%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2014 dan 2015 (Lanjutan)

Kabupaten/kota	49-59 JAM		60 JAM KE ATAS	
	2014	2015	2014	2015
Merauke	18,0%	13.5%	6,5%	6.1%
Jayawijaya	0,0%	.4%	0,0%	0.0%
Kab. Jayapura	9,1%	6.1%	10,6%	5.9%
Nabire	N.A	15.8%	N.A	12.1%
Kep. Yapen	4,4%	6.2%	9,1%	4.4%
Biak Numfor	9,0%	5.5%	23,1%	16.4%
Paniai	1,0%	7.8%	0,9%	.1%
Puncak Jaya	0,2%	2.0%	0,0%	.5%
Mimika	12,8%	16.5%	37,8%	29.9%
Boven Digoel	19,8%	3.4%	29,2%	12.5%
Mappi	7,2%	3.1%	0,9%	.4%
Asmat	12,5%	.4%	1,8%	0.0%
Yahukimo	0,0%	.3%	0,5%	.8%
Peg. Bintang	0,2%	1.8%	0,0%	0.0%
Tolikara	0,0%	.1%	0,0%	0.0%
Sarmi	5,4%	4.2%	4,9%	2.0%
Keerom	9,2%	5.1%	4,1%	1.5%
Waropen	2,2%	3.5%	2,9%	3.8%
Supiori	1,6%	4.5%	2,9%	4.4%
Mamb. Raya	N.A	1.5%	N.A	.3%
Nduga	0,0%	0.0%	0,0%	0.0%
Lanny Jaya	0,0%	.1%	0,0%	0.0%
Mamb. Tengah	0,0%	0.0%	0,0%	0.0%
Yalimo	N.A	0.0%	N.A	0.0%
Puncak	0,8%	0.0%	0,0%	.3%
Dogiyai	1,6%	0.0%	0,0%	0.0%
Intan Jaya	N.A	.2%	N.A	0.0%
Deiyai	0,1%	.5%	0,0%	4.0%
Kota Jayapura	12,0%	18.3%	19,8%	18.7%
PROV. PAPUA	5,1%	5.0%	6,0%	4.9%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	FORMAL		INFORMAL	
	2014	2015	2014	2015
Merauke	29,4%	42.47	70,6%	57.53
Jayawijaya	7,1%	8.33	92,9%	91.67
Kab. Jayapura	36,5%	34.64	63,5%	65.36
Nabire	N.A	54.43	N.A	45.57
Kep. Yapen	26,5%	32.75	73,5%	67.25
Biak Numfor	49,2%	45.56	50,8%	54.44
Paniai	1,0%	5.56	99,0%	94.44
Puncak Jaya	,6%	8.66	99,4%	91.34
Mimika	52,6%	48.12	47,4%	51.88
Boven Digoel	35,3%	30.66	64,7%	69.34
Mappi	6,9%	15.31	93,1%	84.69
Asmat	7,7%	5.72	92,3%	94.28
Yahukimo	2,4%	3.11	97,6%	96.89
Peg. Bintang	4,8%	12.62	95,2%	87.38
Tolikara	3,8%	4.97	96,2%	95.03
Sarmi	19,6%	23.84	80,4%	76.16
Keerom	34,3%	30.32	65,7%	69.68
Waropen	30,7%	34.70	69,3%	65.30
Supiori	24,5%	34.03	75,5%	65.97
Mamb. Raya	N.A	6.77	N.A	93.23
Nduga	,1%	0.00	99,9%	100.00
Lanny Jaya	,1%	2.85	99,9%	97.15
Mamb. Tengah	,9%	4.35	99,1%	95.65
Yalimo	N.A	0.00	N.A	100.00
Puncak	1,2%	6.79	98,8%	93.21
Dogiyai	1,4%	1.06	98,6%	98.94
Intan Jaya	N.A	10.87	N.A	89.13
Deiyai	,2%	6.36	99,8%	93.64
Kota Jayapura	67,7%	66.66	32,3%	33.34
Lainnya*)	21,4%	20.04	78,6%	79.96
PROV. PAPUA	17,3%	42.47	82,7%	57.53

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	2,66	5,49	3,78	8.13	10.87	9.08
Jayawijaya	0,53	0,00	0,27	0.00	0.12	0.06
Kab. Jayapura	11,39	19,33	13,83	14.85	12.34	14.03
Nabire	N.A	N.A	N.A	0.00	12.89	10.14
Kep. Yapen	5,94	4,78	5,47	5.87	10.25	7.54
Biak Numfor	5,85	14,95	9,30	9.47	11.30	10.08
Paniai	0,00	0,00	0,00	1.40	0.23	0.83
Puncak Jaya	1,10	0,63	0,89	0.77	1.04	0.89
Mimika	2,24	17,07	4,67	7.14	10.61	7.94
Boven Digoel	6,80	9,16	7,45	4.84	6.39	5.35
Mappi	16,41	5,33	11,27	3.11	2.72	2.94
Asmat	0,00	0,48	0,22	0.35	0.76	0.53
Yahukimo	0,37	0,00	0,19	1.03	0.00	0.55
Peg. Bintang	2,41	2,13	2,28	3.02	2.39	2.72
Tolikara	2,77	0,75	1,83	0.62	0.32	0.48
Sarmi	3,83	4,37	4,04	2.04	4.72	3.07
Keerom	1,35	3,79	2,21	3.22	5.83	4.19
Waropen	5,75	12,96	7,26	3.01	9.08	4.43
Supiori	17,28	23,97	19,24	8.34	15.18	10.75
Mamb. Raya	N.A	N.A	N.A	0.46	6.68	3.15
Nduga	9,75	0,00	5,43	4.86	0.00	2.70
Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Mamb. Tengah	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Yalimo	N.A	N.A	N.A	0.10	0.00	0.05
Puncak	0,85	1,71	1,24	0.46	1.58	0.96
Dogiyai	5,05	2,02	3,62	1.58	0.00	0.77
Intan Jaya	N.A	N.A	N.A	0.00	0.00	0.00
Deiyai	0,00	0,00	0,00	5.41	5.89	5.64
Kota Jayapura	8,31	12,17	9,55	9.86	11.44	10.37
PROV. PAPUA	3,56	3,28	3,44	4.24	3.63	3.99

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	1,17	7.34	6,66	11.11	4,80	1.93
Jayawijaya	0,43	0.00	0,00	0.00	0,00	0.17
Kab. Jayapura	5,39	7.75	16,25	15.79	16,95	3.88
Nabire	N.A	3.39	N.A	15.31	N.A	0.53
Kep. Yapen	1,31	0.59	7,46	11.84	12,77	2.56
Biak Numfor	4,39	3.38	12,11	12.68	5,74	2.89
Paniai	0,00	0.00	0,00	2.50	0,00	0.38
Puncak Jaya	0,48	0.61	0,00	2.00	49,22	0.63
Mimika	1,24	1.59	5,62	10.48	9,34	1.97
Boven Digoel	6,45	3.06	9,13	7.48	7,60	1.90
Mappi	7,20	1.96	22,30	5.07	8,11	0.03
Asmat	0,00	0.42	2,55	1.43	0,00	0.03
Yahukimo	0,08	0.00	0,44	5.39	4,15	0.04
Peg. Bintang	1,86	1.66	5,59	6.52	0,00	1.16
Tolikara	0,71	0.00	6,56	2.54	14,31	0.01
Sarmi	1,45	0.00	6,59	6.15	4,43	0.62
Keerom	0,34	1.09	3,38	6.82	4,43	1.42
Waropen	0,00	0.00	12,48	7.51	8,72	0.75
Supiori	17,88	9.94	20,52	12.94	23,25	2.29
Mamb. Raya	N.A	1.81	N.A	7.18	N.A	0.25
Nduga	5,57	2.80	0,00	0.00	0,00	0.00
Lanny Jaya	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
Mamb. Tengah	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
Yalimo	N.A	0.07	N.A	0.00	N.A	0.00
Puncak	0,68	0.48	8,09	2.96	0,00	1.74
Dogiyai	4,09	0.66	1,68	1.36	0,00	0.01
Intan Jaya	N.A	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00
Deiyai	0,00	0.00	0,00	21.07	0,00	3.21
Kota Jayapura	0,00	11.35	9,93	11.71	13,47	1.55

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	15,3%	39.29	73,6%	60.71	11,1%	10.84
Jayawijaya	100,0%	0.00	0,0%	100.00	0,0%	100.00
Kab. Jayapura	9,0%	17.41	74,1%	82.59	16,8%	18.73
Nabire	N.A	8.64	N.A	91.36	N.A	3.68
Kep. Yapen	10,5%	2.94	59,1%	97.06	30,5%	20.77
Biak Numfor	12,1%	10.11	79,8%	89.89	8,1%	19.79
Paniai	0,0%	0.00	0,0%	100.00	0,0%	13.43
Puncak Jaya	46,6%	57.86	0,0%	42.14	53,4%	10.71
Mimika	8,5%	5.85	66,6%	94.15	24,8%	17.42
Boven Digoel	51,6%	31.52	42,7%	68.48	5,6%	15.49
Mappi	44,9%	44.01	53,0%	55.99	2,2%	0.00
Asmat	0,0%	69.20	100,0%	30.80	0,0%	0.00
Yahukimo	36,3%	0.00	27,4%	100.00	36,3%	0.00
Peg. Bintang	70,6%	46.49	29,4%	53.51	0,0%	9.67
Tolikara	32,4%	0.00	51,5%	100.00	16,1%	0.00
Sarmi	16,8%	0.00	75,7%	100.00	7,5%	9.65
Keerom	6,3%	13.28	74,5%	86.72	19,2%	16.14
Waropen	0,0%	0.00	80,4%	100.00	19,6%	9.74
Supiori	55,2%	43.51	32,0%	56.49	12,8%	9.53
Mamb. Raya	0,0%	41.96	0,0%	58.04	0,0%	0.00
Nduga	100,0%	100.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00
Lanny Jaya	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00
Mamb. Tengah	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00
Yalimo	N.A	100.00	N.A	0.00	N.A	0.00
Puncak	50,0%	42.83	50,0%	57.17	0,0%	24.67
Dogiyai	91,7%	70.30	8,3%	29.70	0,0%	0.00
Intan Jaya	N.A	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00
Deiyai	0,0%	0.00	0,0%	100.00	0,0%	13.80
Kota Jayapura	0,0%	14.65	64,0%	85.35	36,0%	12.85

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	72,1%	66.83	26,6%	27.18	1,3%	5.99
Jayawijaya	88,8%	78.26	11,2%	20.83	0,0%	0.91
Kab. Jayapura	25,3%	43.70	55,6%	49.65	19,0%	6.65
Nabire	N.A	24.75	N.A	56.71	N.A	18.54
Kep. Yapen	59,0%	52.45	36,0%	41.05	5,1%	6.50
Biak Numfor	40,5%	45.46	44,4%	46.68	15,0%	7.86
Paniai	57,5%	82.81	42,5%	16.51	0,0%	0.68
Puncak Jaya	87,2%	86.80	12,8%	12.26	0,0%	0.94
Mimika	56,8%	62.21	32,6%	27.51	10,6%	10.27
Boven Digoel	77,5%	59.43	16,8%	32.91	5,7%	7.66
Mappi	80,8%	86.88	18,5%	12.96	,6%	0.16
Asmat	95,8%	91.03	4,2%	7.91	0,0%	1.06
Yahukimo	89,0%	92.44	10,8%	7.56	,1%	0.00
Peg. Bintang	88,8%	87.21	11,2%	12.79	0,0%	0.00
Tolikara	85,4%	79.66	13,1%	19.45	1,6%	0.89
Sarmi	54,3%	51.87	40,5%	40.37	5,2%	7.76
Keerom	54,6%	64.59	39,9%	32.65	5,4%	2.76
Waropen	44,3%	41.60	38,6%	54.62	17,1%	3.78
Supiori	74,5%	53.43	20,2%	32.08	5,2%	14.49
Mamb. Raya	N.A	77.77	N.A	21.12	N.A	1.11
Nduga	94,6%	91.14	5,4%	8.86	0,0%	0.00
Lanny Jaya	78,9%	69.76	21,1%	27.79	0,0%	2.46
Mamb. Tengah	81,3%	64.93	18,7%	30.31	0,0%	4.76
Yalimo	N.A	83.99	N.A	16.01	N.A	0.00
Puncak	93,6%	87.22	5,9%	10.14	,6%	2.64
Dogiyai	81,8%	82.51	16,5%	16.99	1,7%	0.50
Intan Jaya	N.A	88.71	N.A	10.87	N.A	0.42
Deiyai	75,9%	84.27	24,1%	15.17	0,0%	0.56
Kota Jayapura	35,1%	25.62	49,4%	55.91	15,4%	18.47
PROV. PAPUA	76,9%	76.66	20,8%	20.61	2,3%	2.74

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	2014	2015
Merauke	38.934	45,858
Jayawijaya	17.948	17,906
Kab. Jayapura	33.254	34,271
Nabire	N.A	31,183
Kep. Yapen	17.792	19,351
Biak Numfor	34.143	38,768
Paniai	9.396	6,808
Puncak Jaya	10.375	4,908
Mimika	56.936	49,256
Boven Digoel	13.208	10,955
Mappi	7.059	10,577
Asmat	11.954	12,548
Yahukimo	8.429	11,750
Peg. Bintang	1.222	2,045
Tolikara	11.509	2,664
Sarmi	5.374	7,155
Keerom	10.450	8,359
Waropen	8.083	8,841
Supiori	4.782	4,880
Mamb. Raya	N.A	2,610
Nduga	408	860
Lanny Jaya	5.646	7,374
Mamb. Tengah	282	329
Yalimo	N.A	127
Puncak	6.706	8,772
Dogiyai	10.711	3,968
Intan Jaya	N.A	4,769
Deiyai	795	4,792
Kota Jayapura	88.484	85,601
PROV. PAPUA	454.291	447,285

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 dan 2015

Indikator	2014			2015			
	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke		14,77	38,16	25,80	12.68	48.68	29.70
Jayawijaya		12,69	11,62	12,16	10.80	12.92	11.83
Kab. Jayapura		22,11	59,70	39,50	24.26	57.62	39.68
Nabire		N.A	N.A	N.A	16.29	48.58	30.98
Kep. Yapen		19,12	40,64	29,54	17.87	45.69	31.31
Biak Numfor		24,13	50,27	36,75	23.48	58.67	40.34
Paniai		8,74	8,18	8,47	6.99	4.99	6.03
Puncak Jaya		12,33	12,55	12,43	3.45	8.41	5.72
Mimika		14,72	76,48	40,38	13.55	63.43	34.25
Boven Digoel		12,90	57,14	32,17	10.77	44.85	25.73
Mappi		10,54	15,00	12,66	12.90	24.19	18.40
Asmat		19,43	25,76	22,48	13.70	32.32	22.82
Yahukimo		6,74	7,39	7,05	7.13	12.25	9.59
Peg. Bintang		1,90	3,45	2,62	4.40	4.17	4.29
Tolikara		14,20	12,10	13,24	2.72	3.24	2.96
Sarmi		13,67	31,69	21,65	18.87	38.62	27.80
Keerom		16,71	41,95	27,82	11.47	34.63	21.78
Waropen		15,00	74,91	43,38	19.67	73.79	45.88
Supiori		26,09	65,48	44,62	26.08	58.48	42.01
Mamb. Raya		N.A	N.A	N.A	10.80	28.90	19.64
Nduga		0,69	0,71	0,70	1.62	1.19	1.43
Lanny Jaya		7,06	2,44	4,93	7.24	5.20	6.29
Mamb. Tengah		0,00	2,00	0,92	1.40	0.64	1.05
Yalimo		N.A	N.A	N.A	0.00	0.66	0.31
Puncak		5,34	14,45	9,71	7.23	17.89	12.34
Dogiyai		13,82	22,75	18,30	8.19	5.06	6.61
Intan Jaya		N.A	N.A	N.A	8.37	22.03	15.02
Deiyai		3,07	0,38	1,76	10.34	10.20	10.27
Kota Jayapura		27,71	60,60	43,00	25.64	57.71	40.28
PROV. PAPUA		14,17	29,51	21,33	12.34	29.67	20.43

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014 dan 2015

Kabupaten/kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Merauke	49,6%	48.6%	41,7%	40.7%	8,7%	10.7%
Jayawijaya	62,5%	66.6%	34,7%	29.8%	2,8%	3.5%
Kab. Jayapura	23,2%	31.5%	63,1%	56.7%	13,7%	11.7%
Nabire	N.A	25.9%	N.A	58.1%	N.A	16.0%
Kep. Yapen	43,7%	37.8%	43,3%	48.6%	13,0%	13.6%
Biak Numfor	25,6%	30.2%	61,3%	55.7%	13,2%	14.1%
Paniai	71,5%	69.5%	28,4%	28.9%	,1%	1.6%
Puncak Jaya	86,0%	84.5%	13,0%	14.0%	1,0%	1.5%
Mimika	32,2%	29.2%	55,4%	58.1%	12,4%	12.7%
Boven Digoel	59,6%	55.1%	34,8%	37.9%	5,5%	7.0%
Mappi	70,2%	66.1%	26,8%	32.4%	3,0%	1.5%
Asmat	89,8%	87.2%	8,7%	11.4%	1,4%	1.4%
Yahukimo	86,4%	88.7%	11,9%	10.2%	1,7%	1.1%
Peg. Bintang	86,7%	76.1%	12,0%	18.3%	1,3%	5.6%
Tolikara	83,6%	79.1%	14,4%	19.0%	2,1%	1.9%
Sarmi	46,8%	46.9%	46,4%	45.0%	6,9%	8.1%
Keerom	41,6%	50.9%	48,8%	43.3%	9,6%	5.7%
Waropen	36,9%	32.9%	46,8%	53.3%	16,3%	13.8%
Supiori	59,4%	47.0%	30,1%	39.0%	10,6%	14.0%
Mamb. Raya	N.A	72.8%	N.A	25.4%	N.A	1.8%
Nduga	97,5%	96.3%	2,5%	3.7%	0,0%	0.0%
Lanny Jaya	79,4%	76.5%	20,6%	20.7%	0,0%	2.8%
Mamb. Tengah	86,5%	72.5%	12,9%	22.5%	,6%	5.0%
Yalimo	N.A	81.1%	N.A	18.9%	N.A	0.0%
Puncak	91,8%	86.1%	7,7%	10.6%	,6%	3.4%
Dogiyai	81,0%	81.8%	17,9%	16.8%	1,1%	1.4%
Intan Jaya	N.A	86.1%	N.A	12.6%	N.A	1.3%
Deiyai	73,3%	74.2%	26,6%	23.1%	,1%	2.7%
Kota Jayapura	13,0%	13.4%	61,5%	64.2%	25,5%	22.4%
PROV. PAPUA	62,8%	61.6%	31,1%	31.8%	6,1%	6.6%

Ket: N.A: *Not Available*) Data tidak tersedia,sampel tidak mencukupi estimasi level Kabupaten

Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN UTAMA									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
Berusaha sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**
Statistics of Papua Province

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490
E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>

ISBN 978-602-0963-21-1



9 786020 963211